



WALI KOTA BOGOR
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA BOGOR
NOMOR 061/Kep.071.1-Bag.Org/2021
TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BOGOR NOMOR
061.45-417 TAHUN 2020 TENTANG PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

WALI KOTA BOGOR,

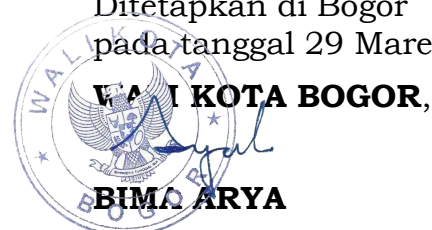
- Menimbang : a. bahwa Pemerintah Daerah Kota Bogor telah menetapkan Keputusan Wali Kota Bogor Nomor 061.45-417 Tahun 2020 tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor, dalam penerapan Peta Proses Bisnis tersebut perlu penyesuaian dalam rangka mengimplementasikan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 sebagaimana tercantum dalam Pasal 2;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Perubahan Lampiran Keputusan Wali Kota Bogor Tentang peta proses bisnis di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3058);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 411);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441);
9. Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah oleh Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bogor (Lembaran Daerah Kota Bogor Tahun 2019 Nomor 1 Seri D);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Perubahan Atas Lampiran Keputusan Walikota Bogor Nomor 061.45-417 Tahun 2020 Tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Bogor.
- KEDUA : Peta Proses Bisnis sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan Pemerintah Daerah Kota Bogor dalam mewujudkan Birokrasi yang profesional serta tata kelola pemerintahan yang baik dalam memberikan pelayanan publik.
- KETIGA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bogor
pada tanggal 29 Maret 2021



Tembusan disampaikan kepada Yth.:
Kepala Perangkat Daerah
di lingkungan Pemerintah Kota Bogor.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BOGOR

NOMOR : 061/Kep.071.1-Bag.Org/2021

TANGGAL : 29 Maret 2021

TENTANG : PERUBAHAN LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA BOGOR NOMOR 061.45-417 TAHUN 2020 TENTANG PETA PROSES BISNIS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR

**PETA PROSES BISNIS PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR
TAHUN 2019-2024**

A. Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kota Bogor Tahun 2019-2024



B. Proses Utama

BKT-01	Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang sehat dan Lingkungan yang berkualitas
BKT-02	Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter
BKT-03	Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang Cerdas dan Melayani
BKT-04	Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat
BKT-05	Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah

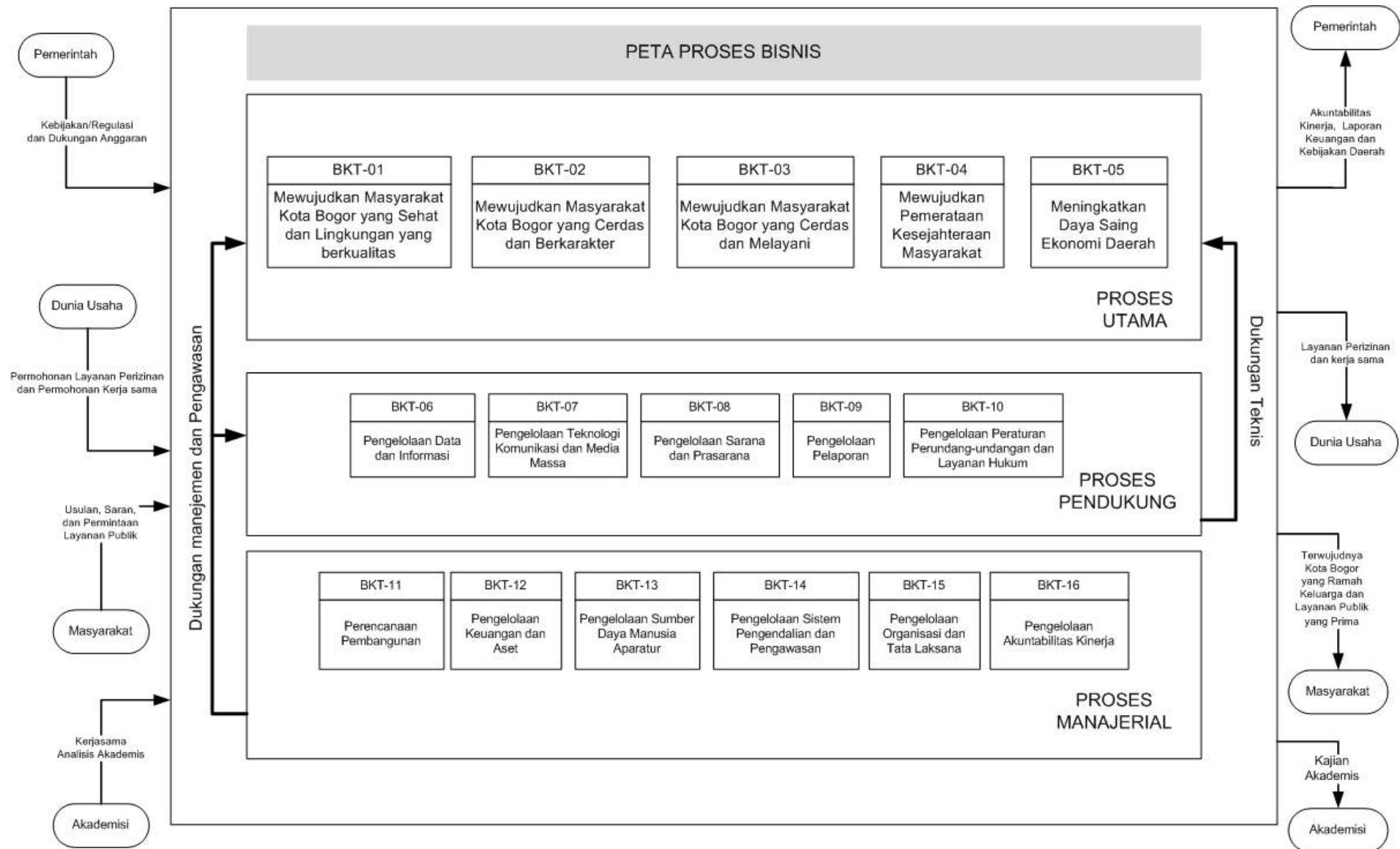
C. Proses Pendukung

BKT-06	Pengelolaan Data dan Informasi
BKT-07	Pengelolaan Teknologi Komunikasi dan Media Massa
BKT-08	Pengelolaan Saran dan Prasarana
BKT-09	Pengelolaan Pelaporan
BKT-10	Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan dan Layanan Hukum

D. Proses Manajerial

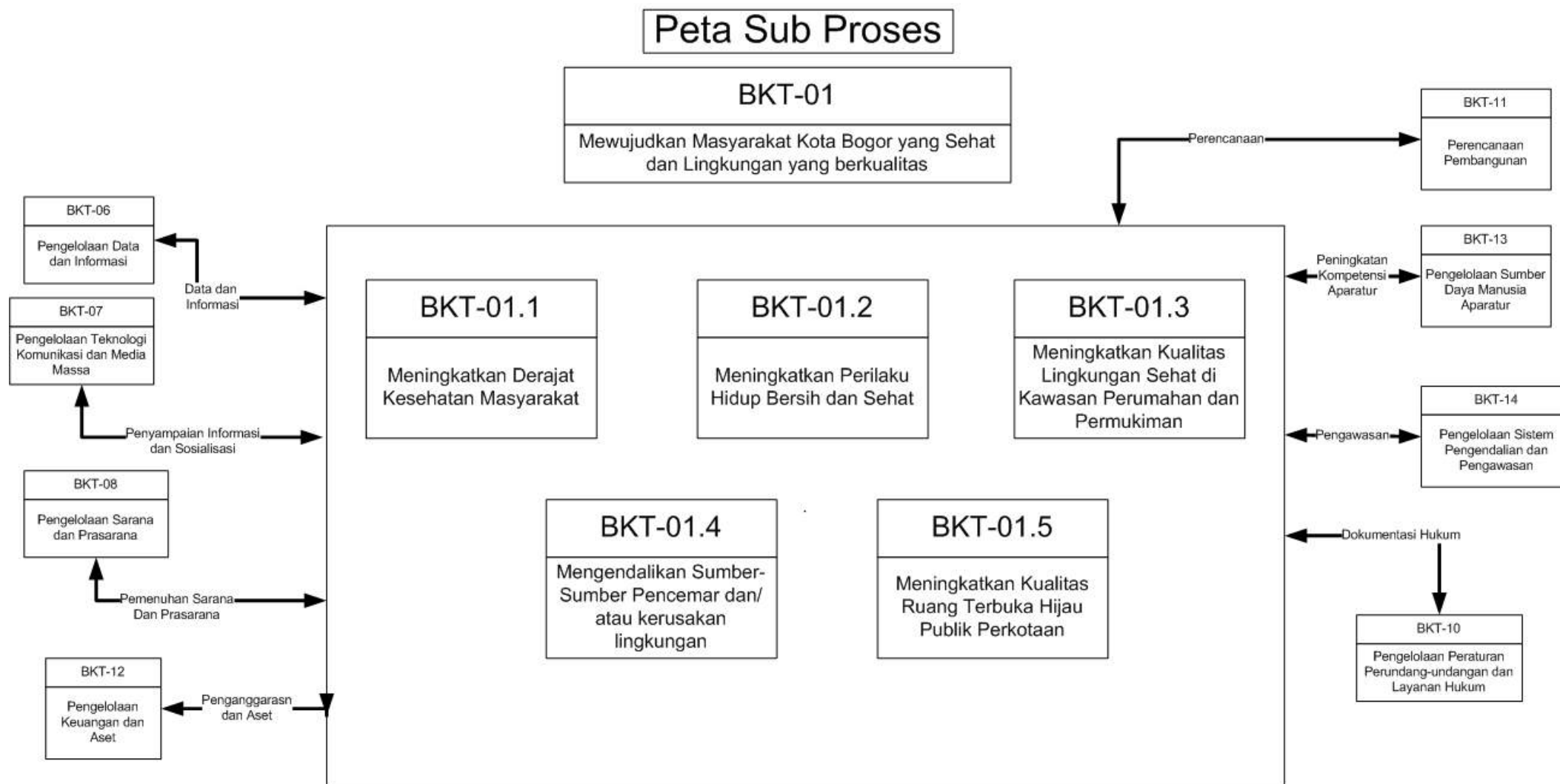
BKT-11	Perencanaan Pembangunan
BKT-12	Pengelolaan Keuangan dan Aset
BKT-13	Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur
BKT-14	Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan
BKT-15	Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana
BKT-16	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

E. Peta Proses Bisnis



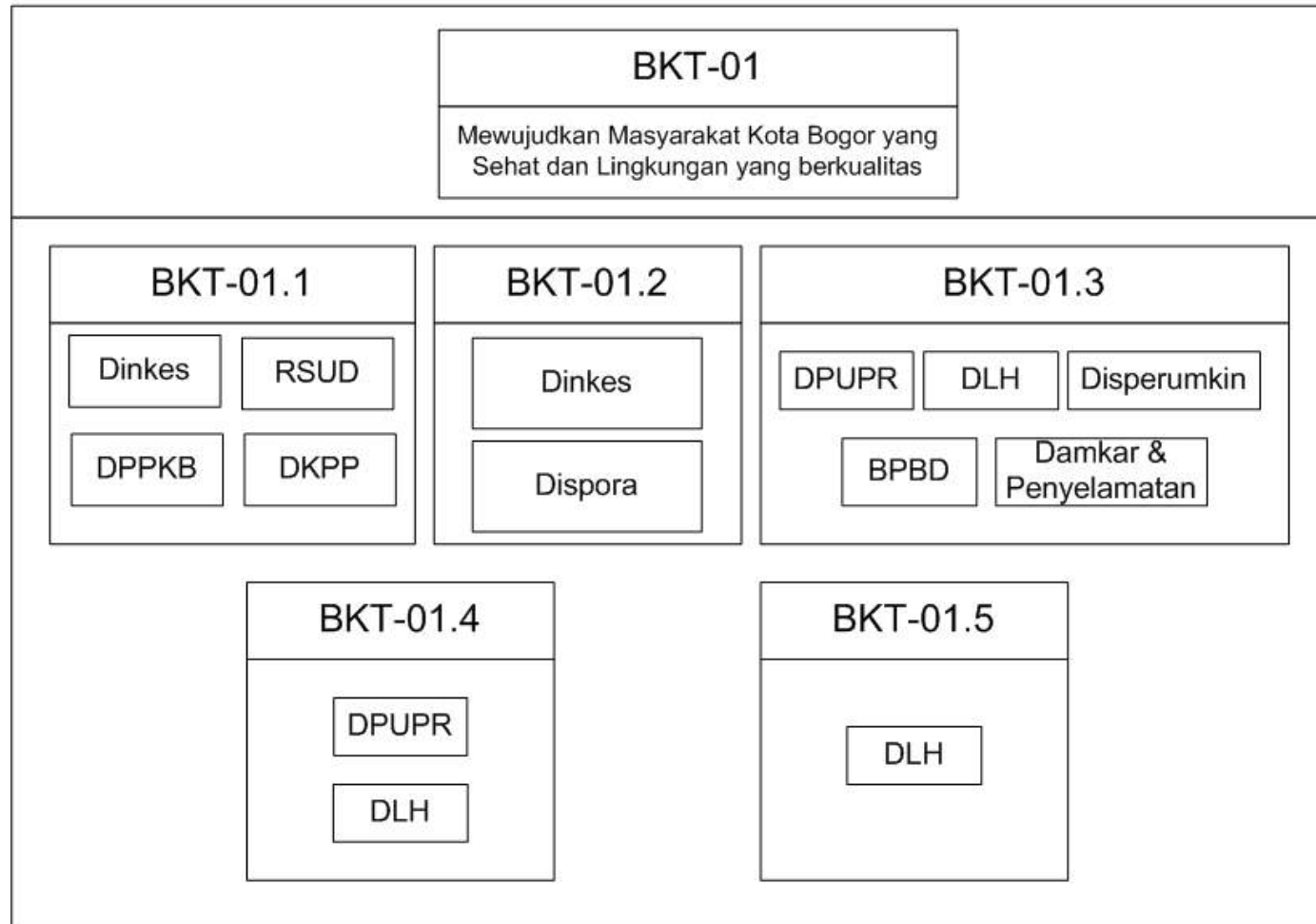
F. Peta Sub Proses

1. Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang sehat dan Lingkungan yang berkualitas



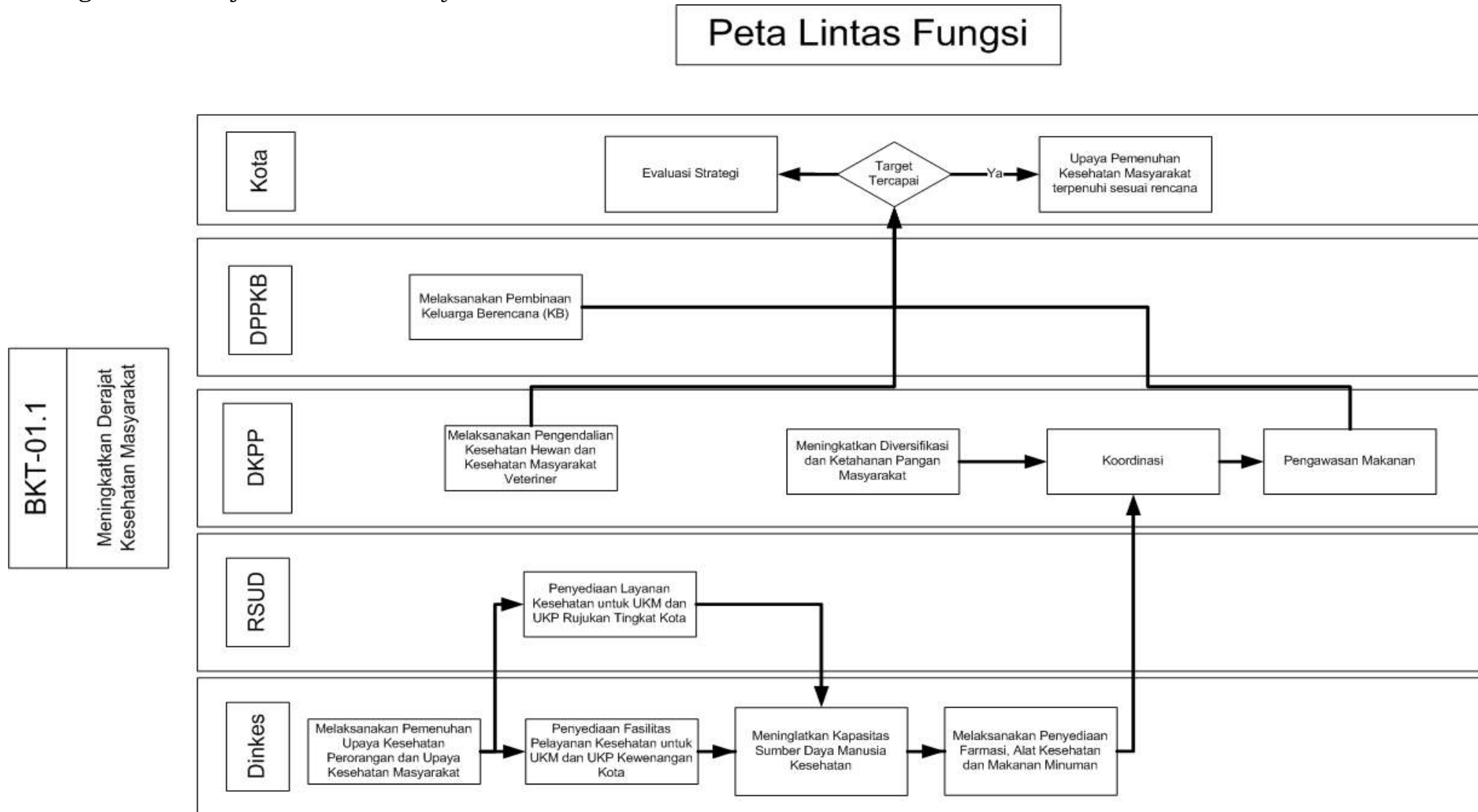
Peta Relasi BKT-01 Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang sehat dan Lingkungan yang berkualitas

Peta Relasi



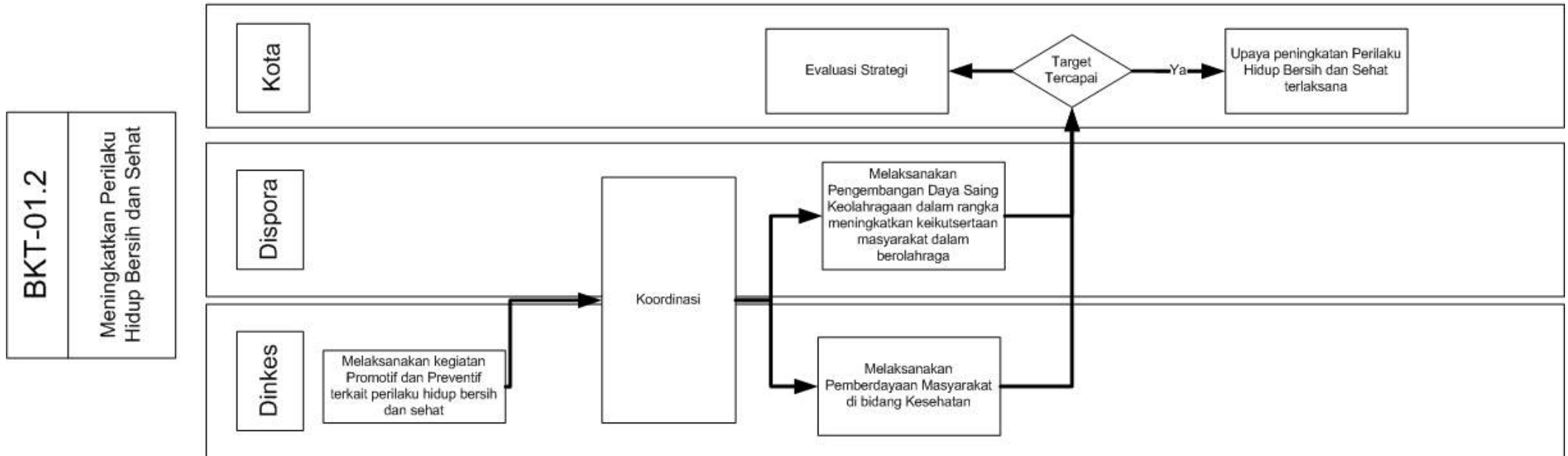
Peta Lintas Fungsi:

a. Meningkatkan Derajat Kesehatan Masyarakat

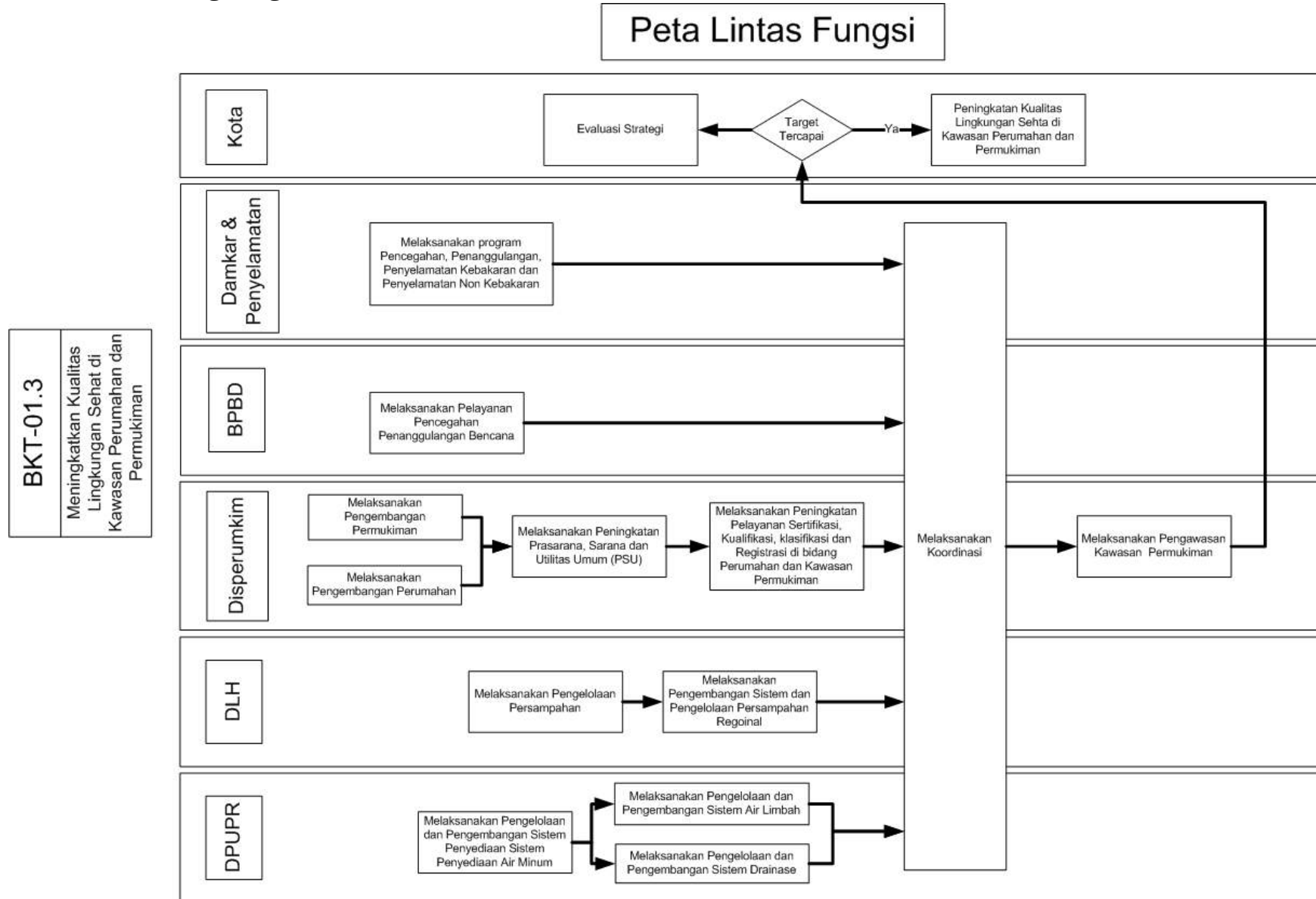


b. Meningkatkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat

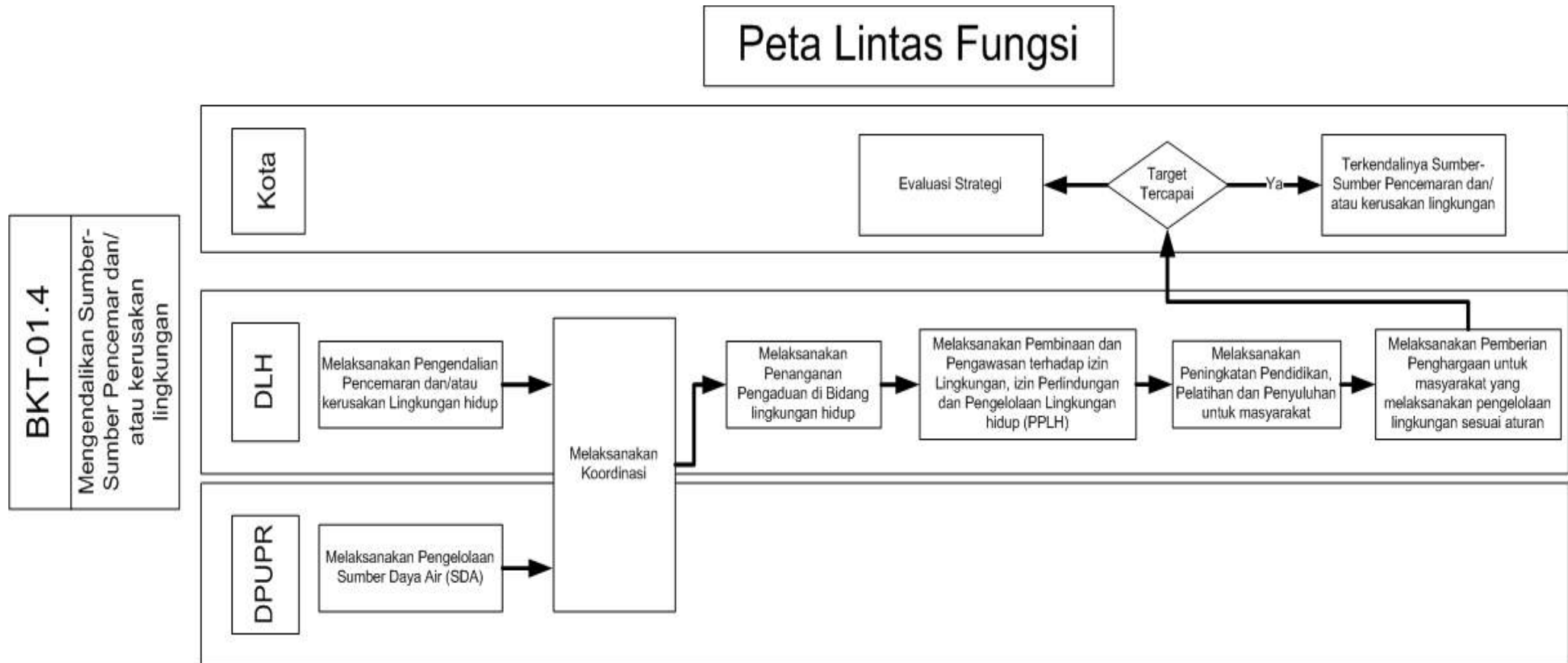
Peta Lintas Fungsi



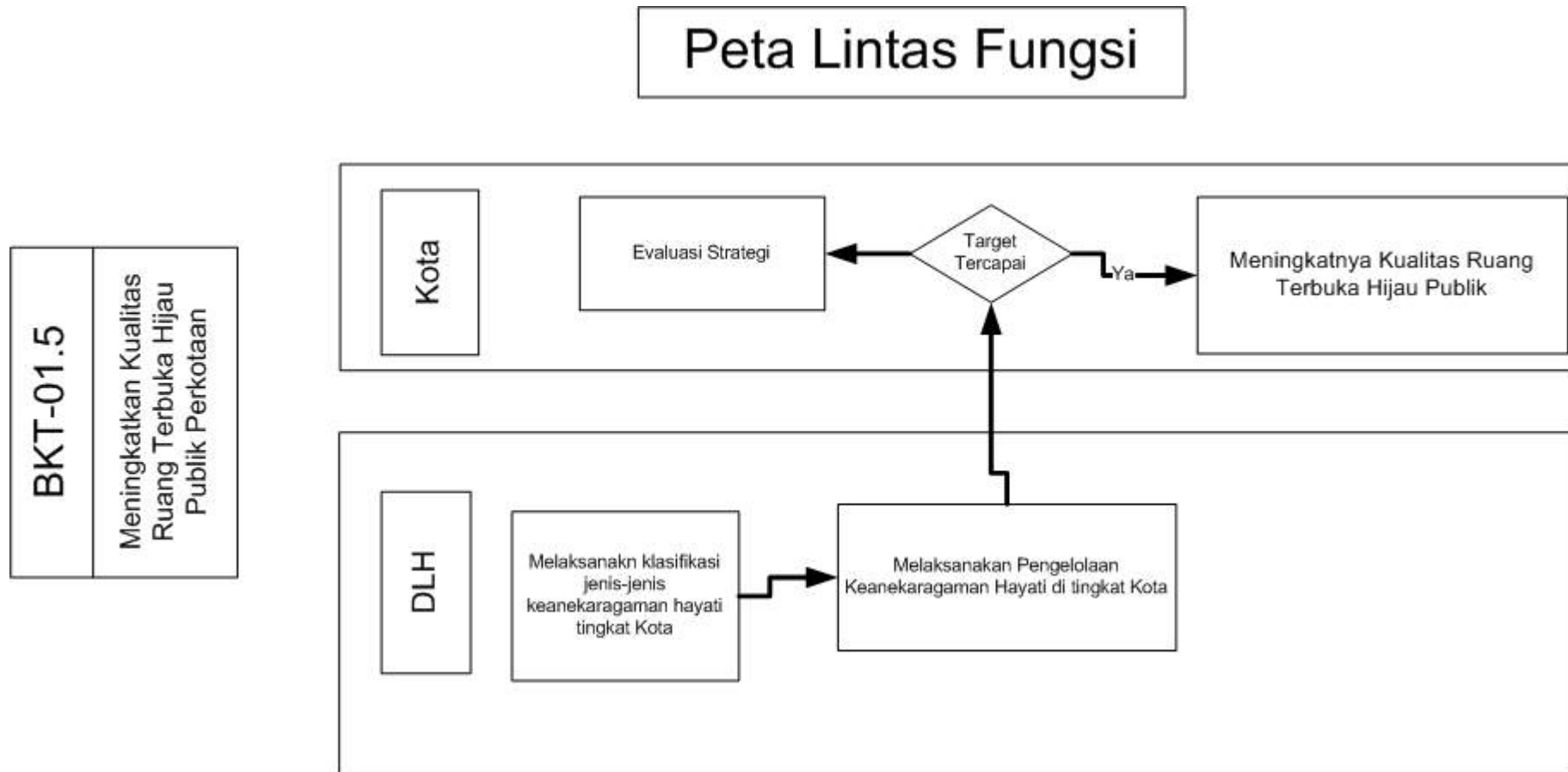
c. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Sehat di Kawasan Perumahan dan Permukiman



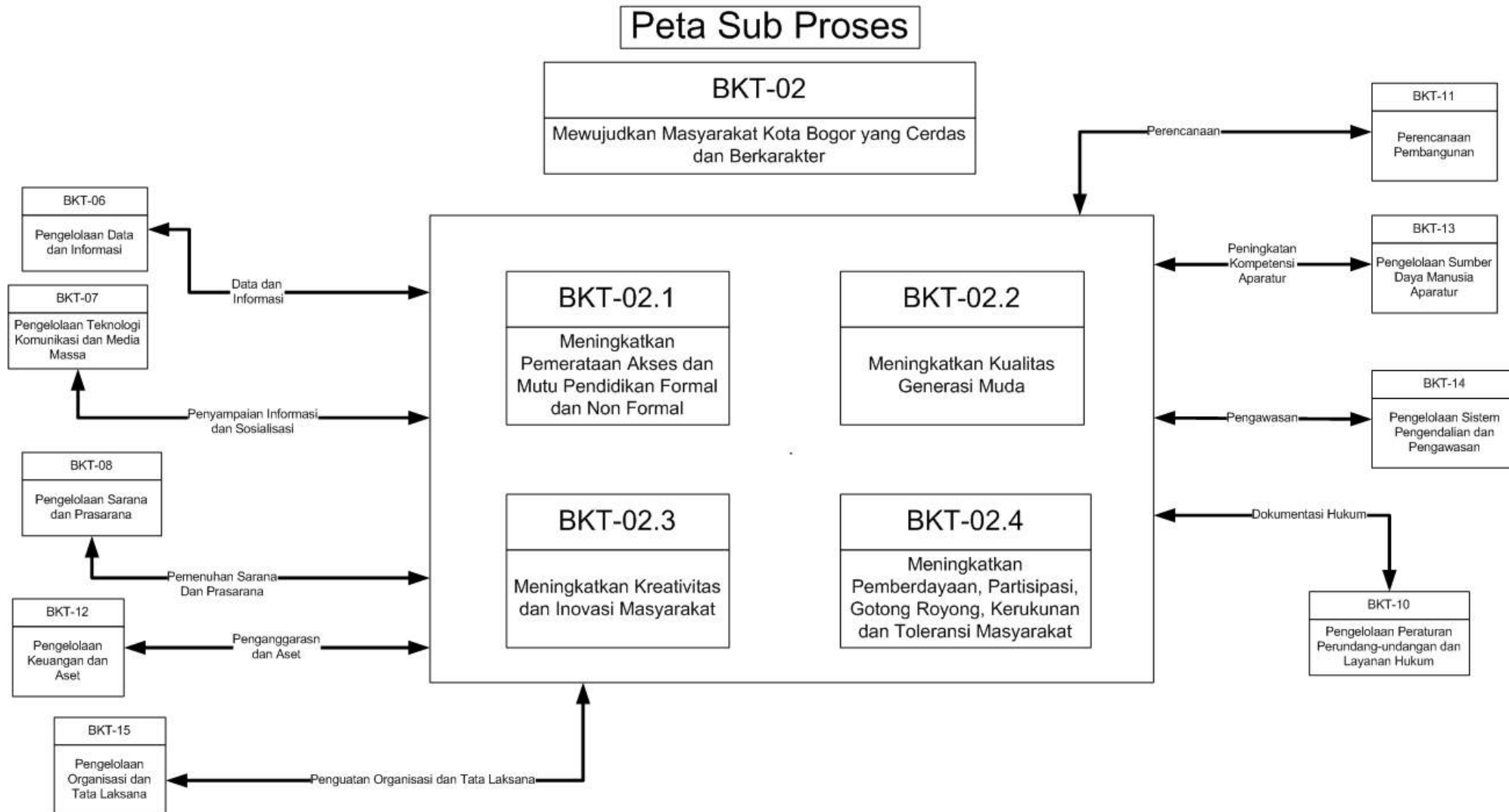
d. Mengendalikan Sumber-Sumber Pencemar dan/atau kerusakan Lingkungan



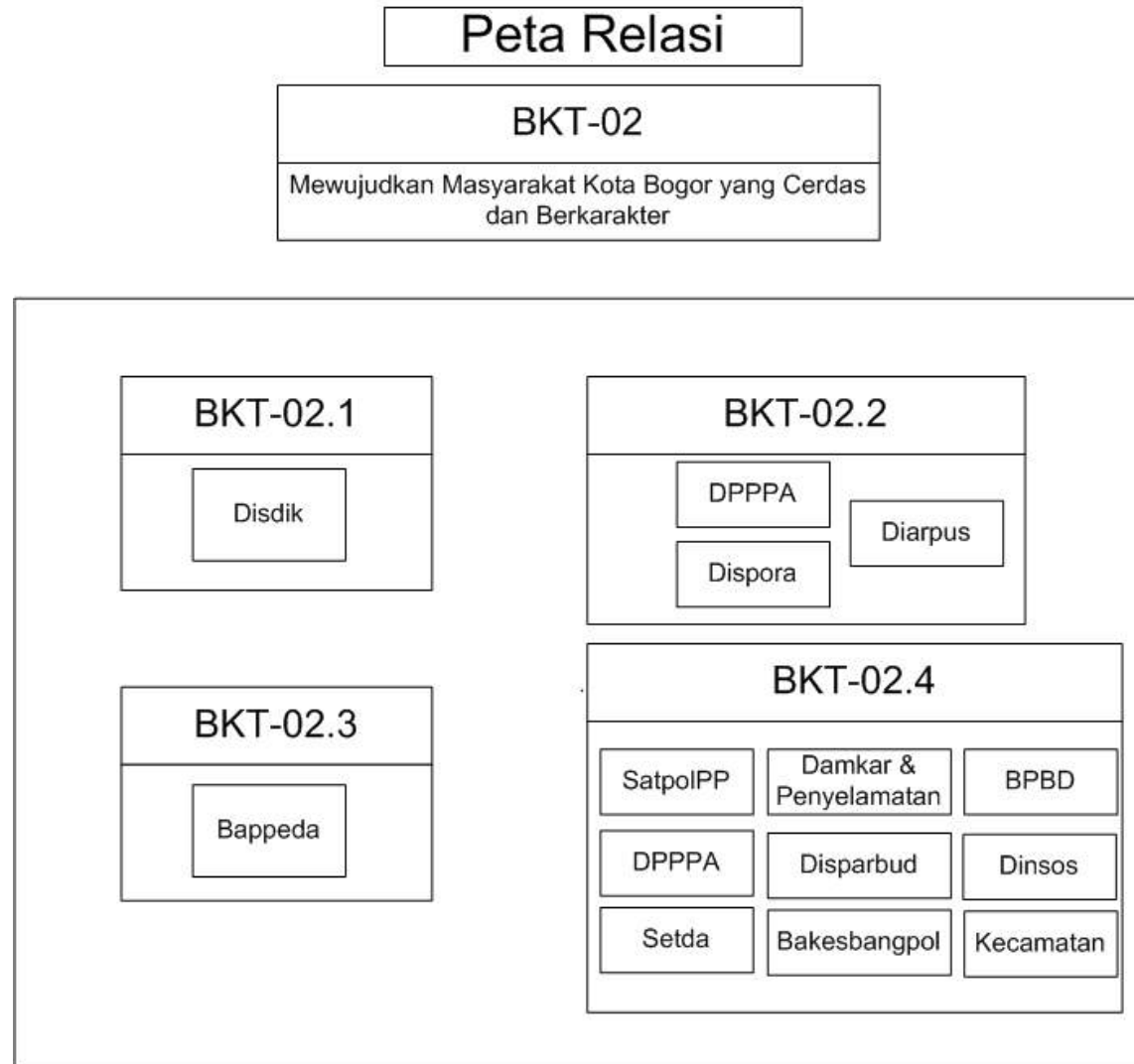
e. Meningkatkan Kualitas Ruang Terbuka Hijau Perkotaan



2. Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter

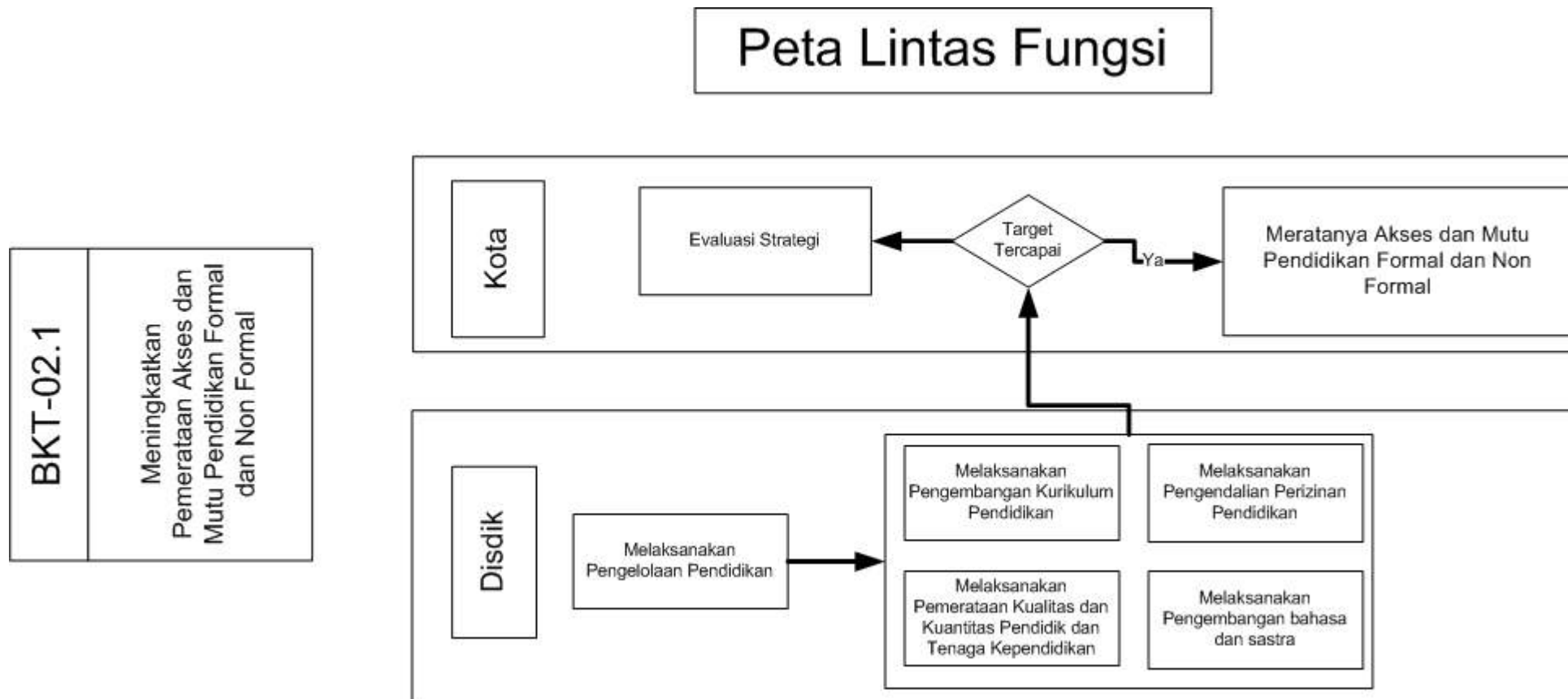


Peta Relasi BKT-02 Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang Cerdas dan Berkarakter

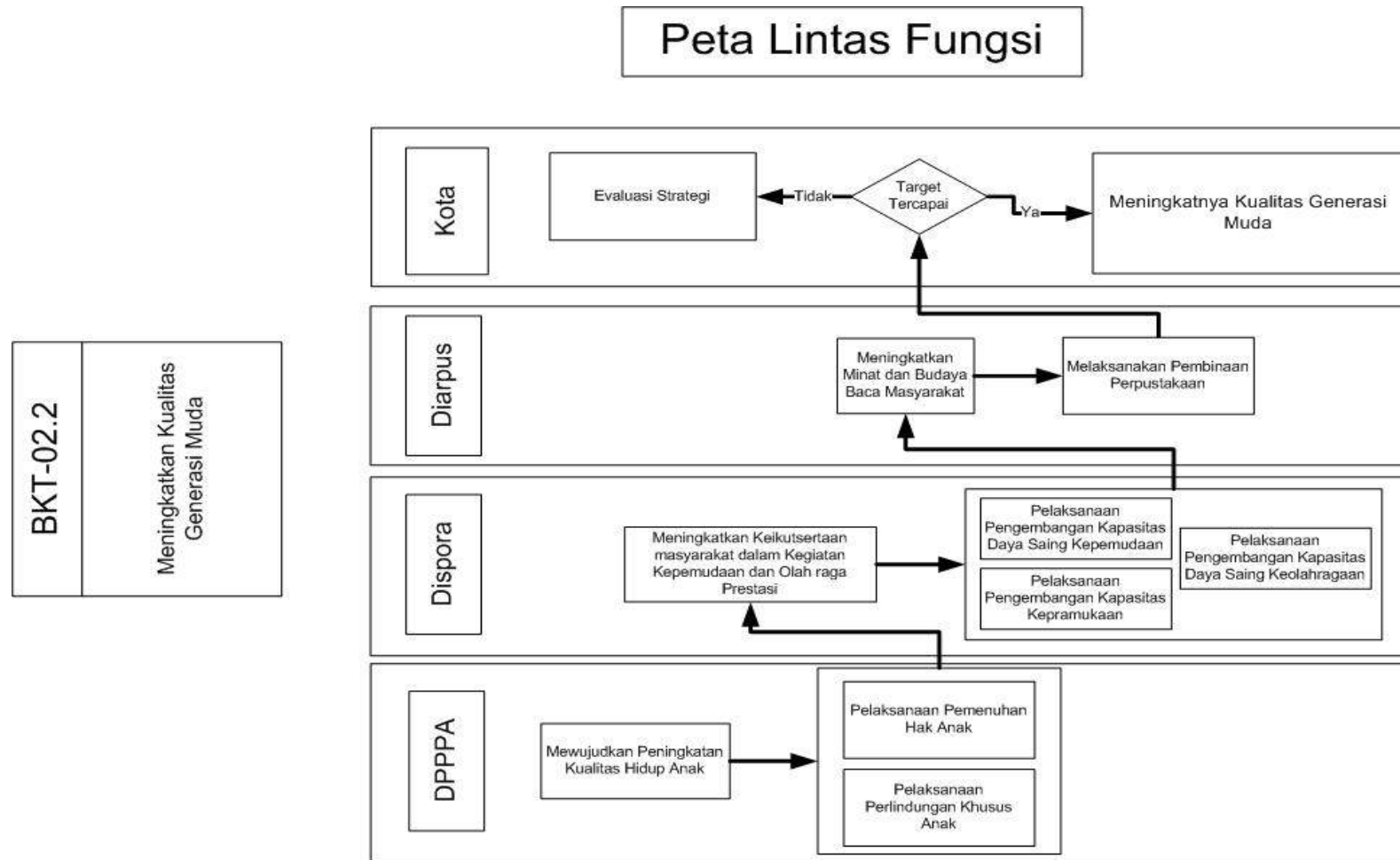


Peta Lintas Fungsi:

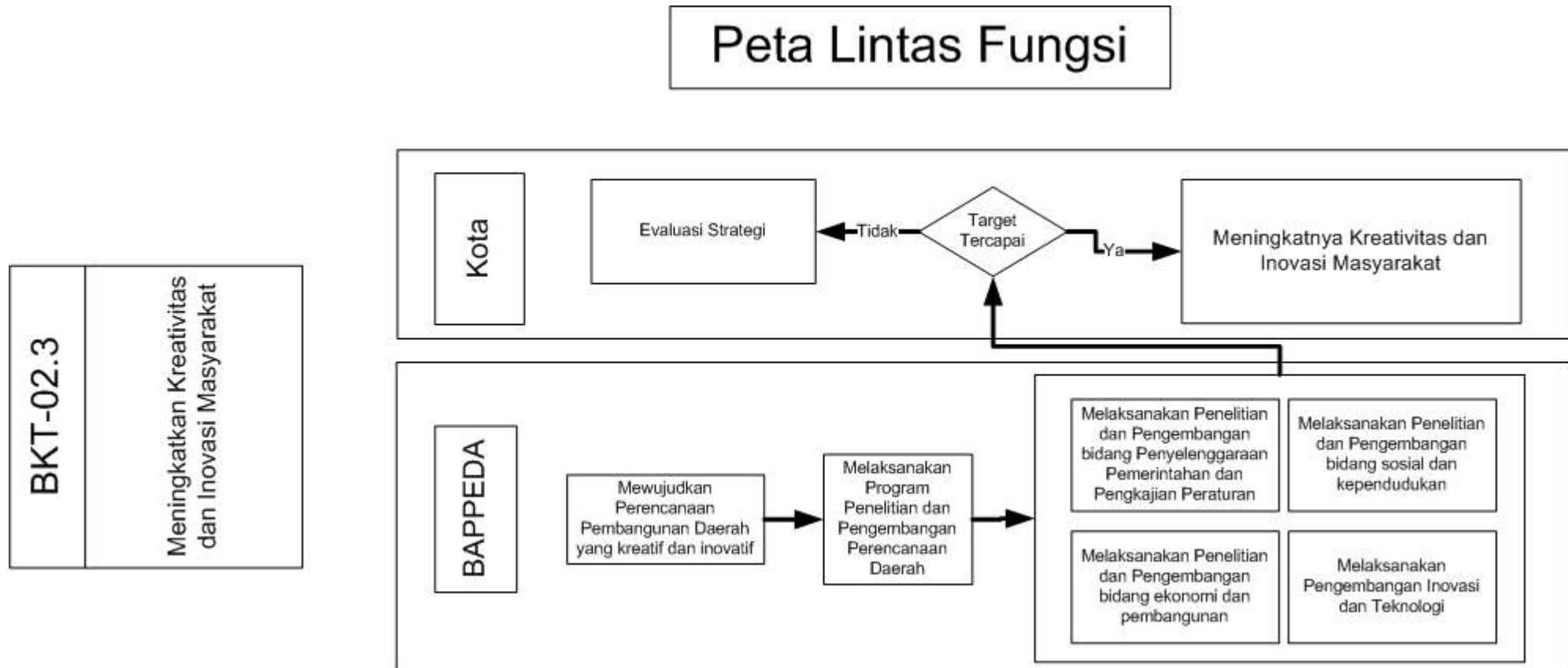
a. Meningkatkan Pemerataan Akses dan Mutu Pendidikan Formal dan Non Formal



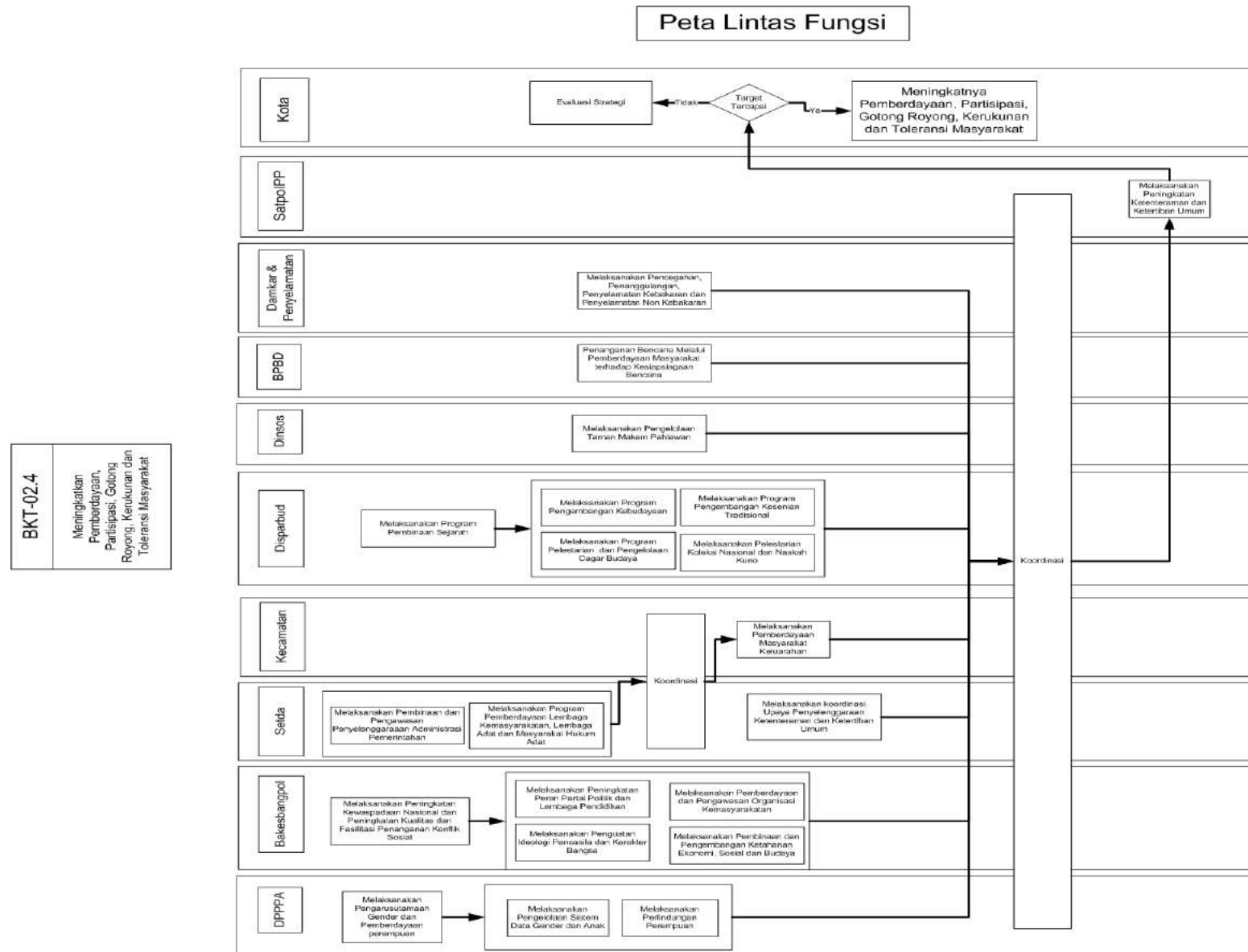
b. Meningkatkan Kualitas Generasi Muda



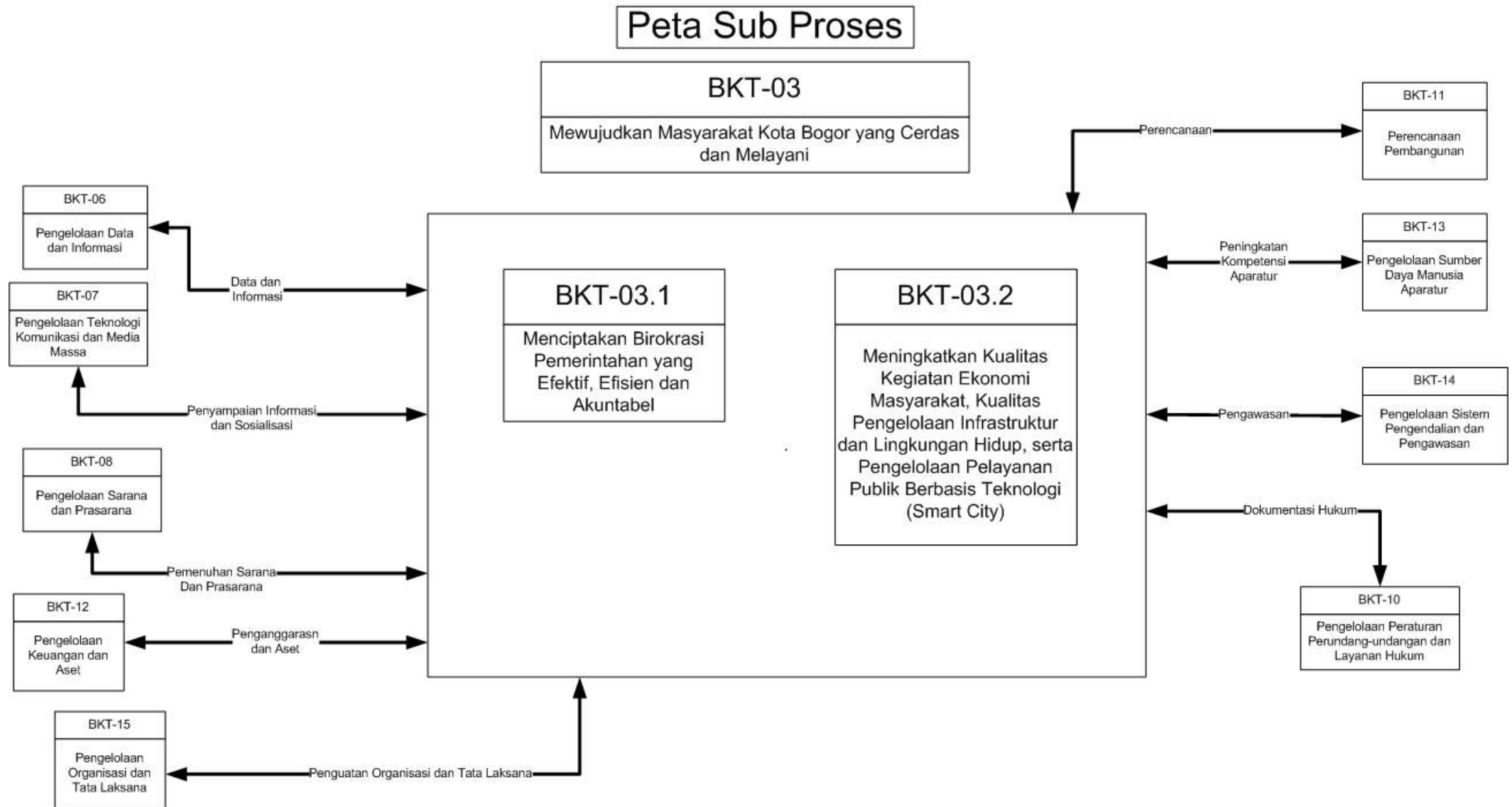
c. Meningkatkan Kreativitas dan Inovasi Masyarakat



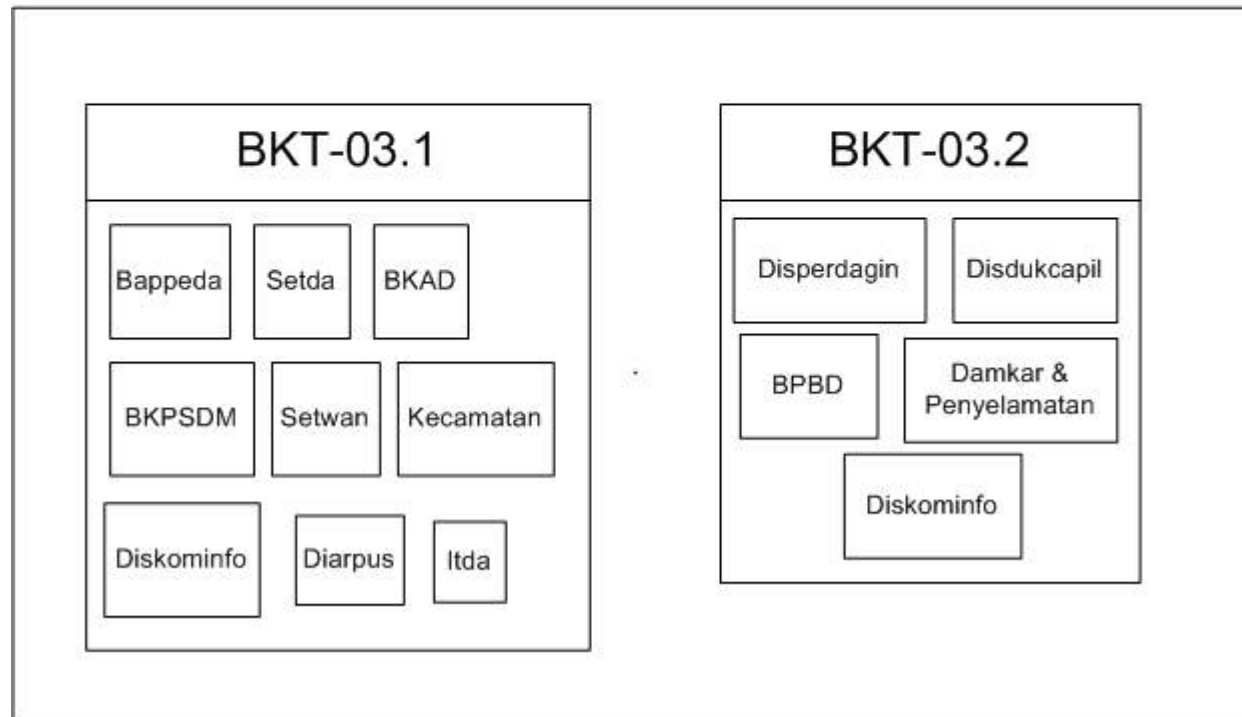
d. Meningkatkan Pemberdayaan, Partisipasi, Gotong Royong, Kerukunan dan Toleransi Masyarakat



3. Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang Cerdas dan Melayani

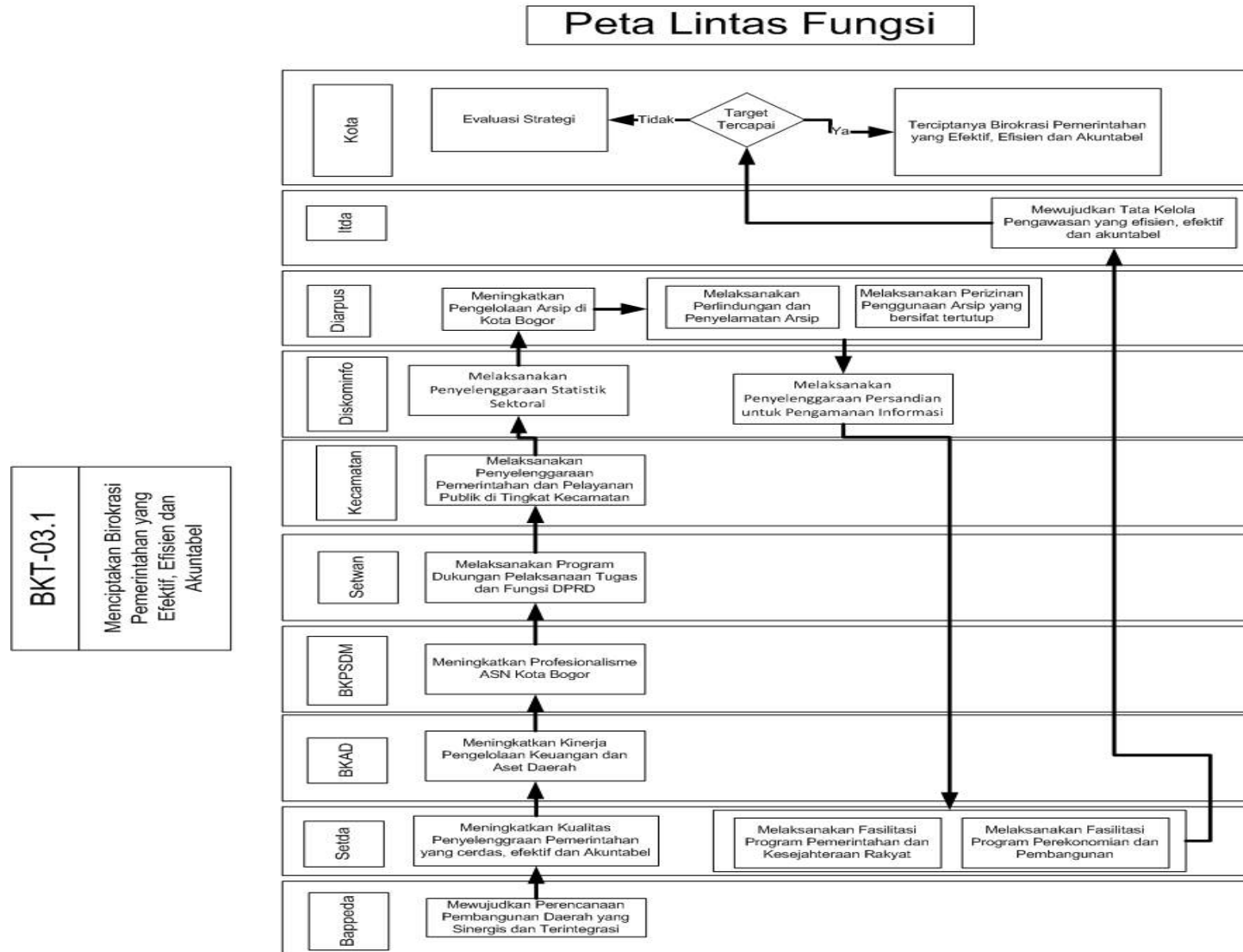


Peta Relasi BKT-03 Mewujudkan Masyarakat Kota Bogor yang Cerdas dan Melayani

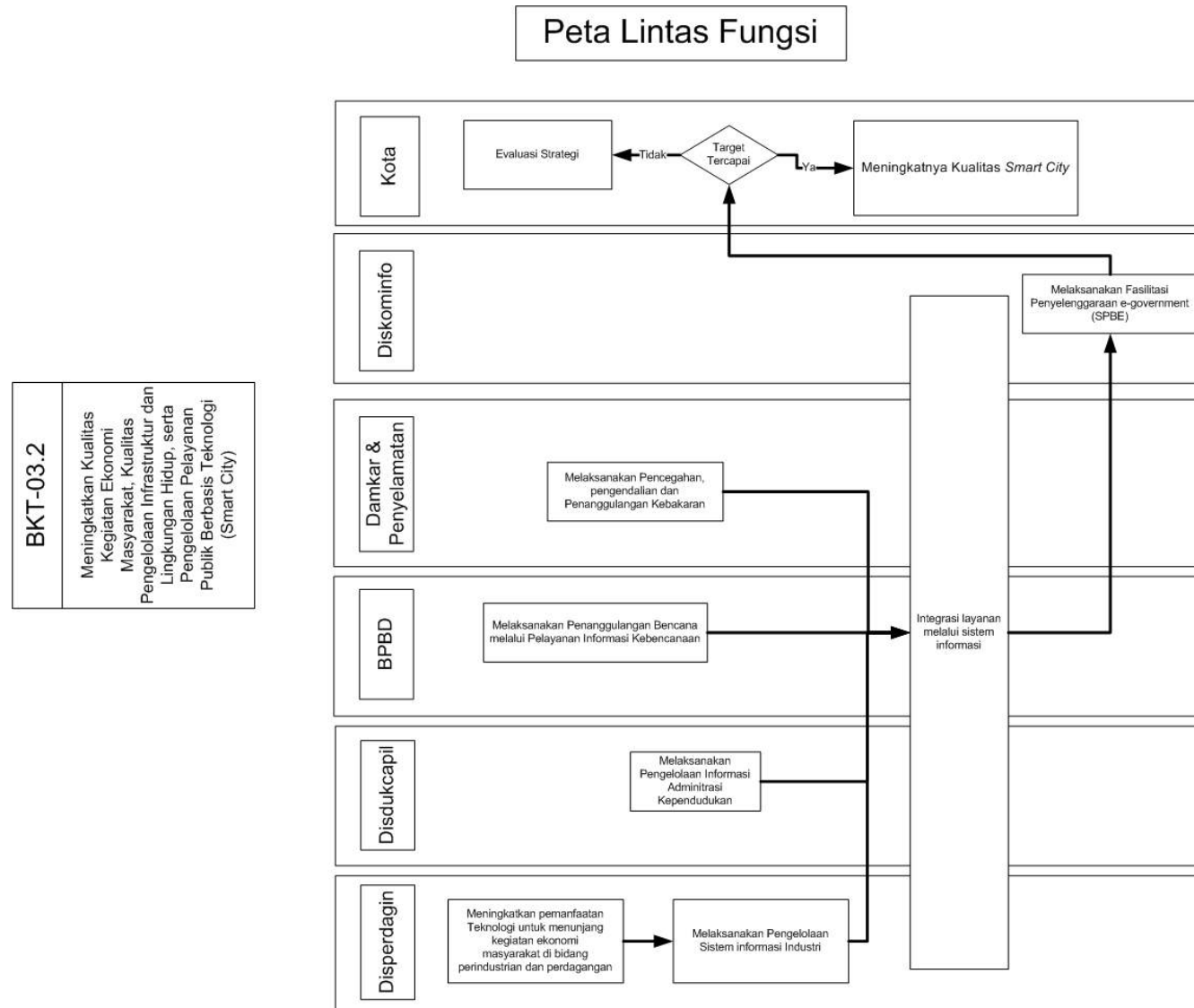


Peta Lintas Fungsi

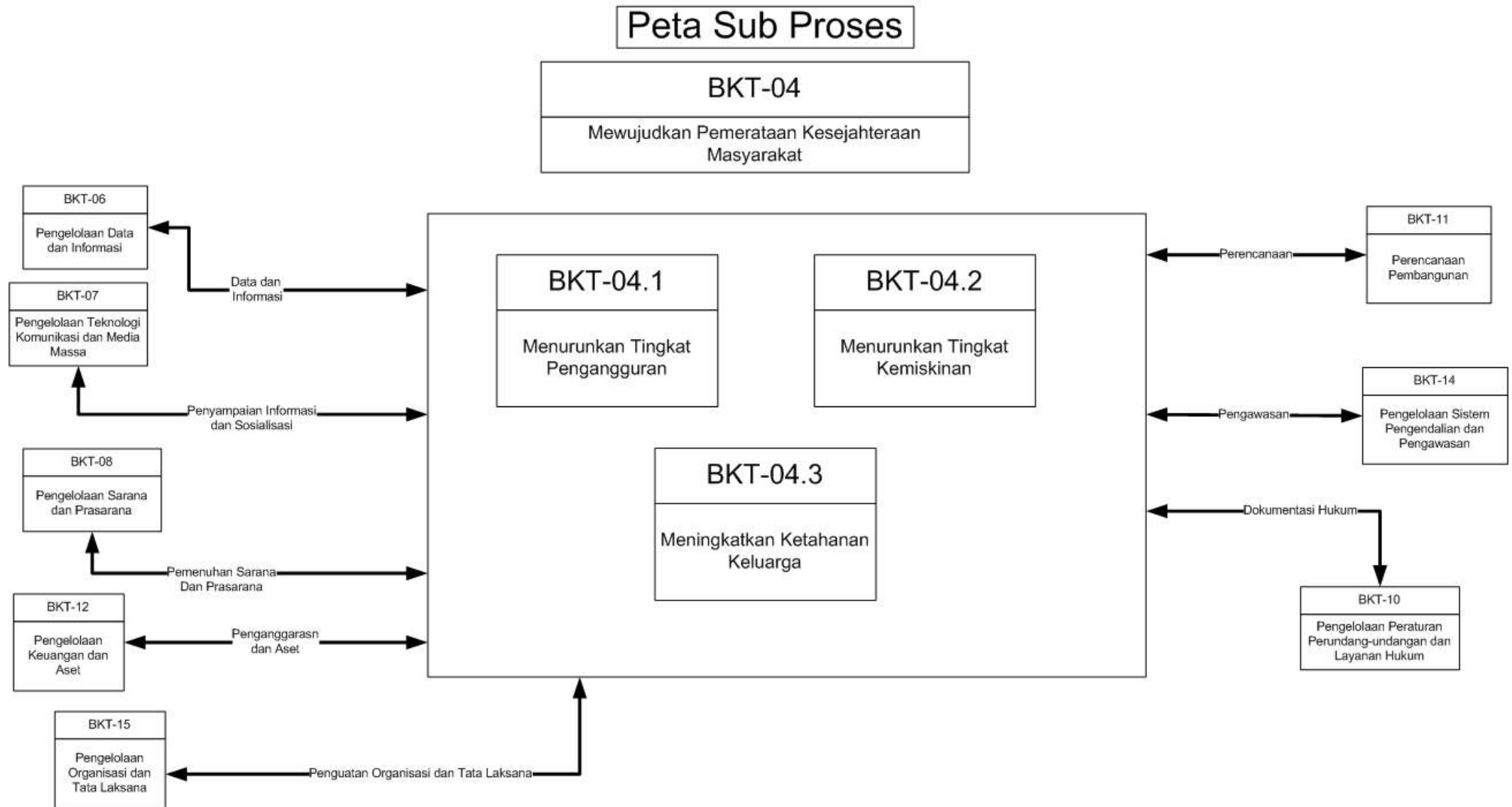
a. Menciptakan Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel



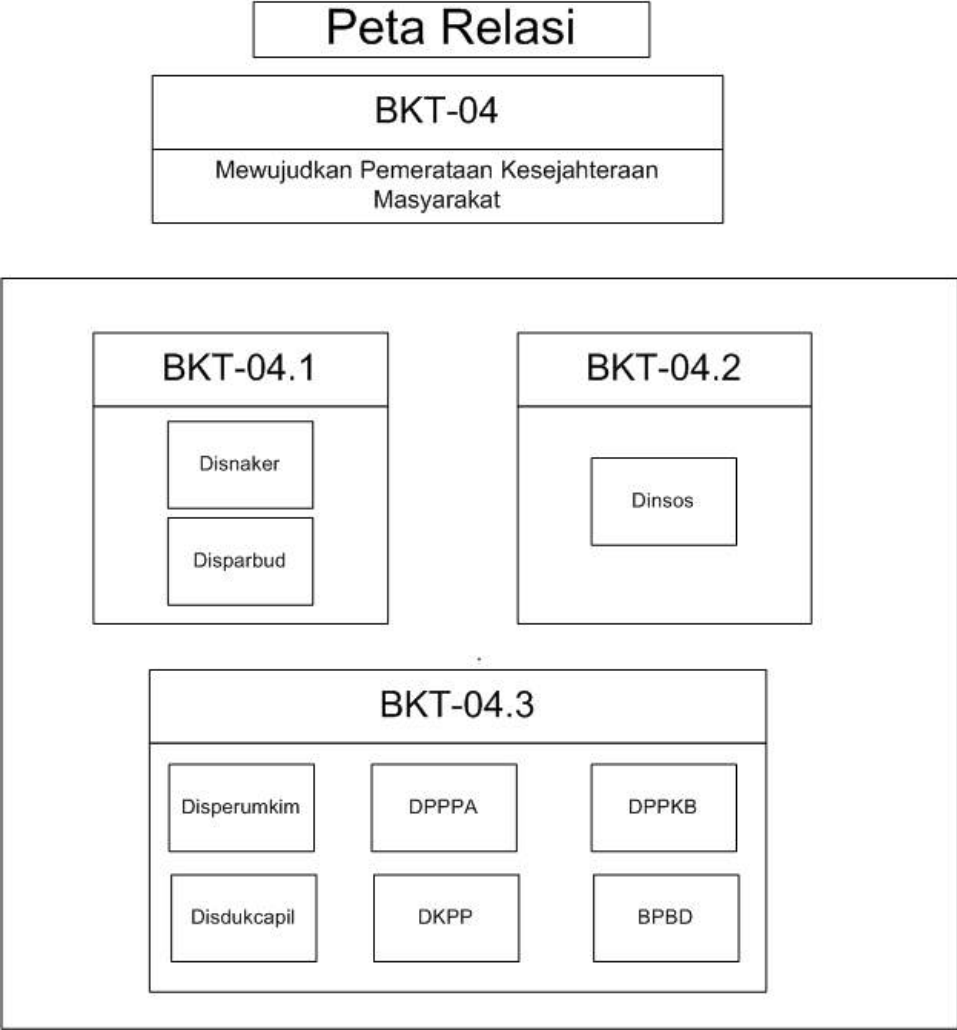
- b. Meningkatkan Kualitas Kegiatan Ekonomi Masyarakat, Kualitas Pengelolaan Infrastruktur dan Lingkungan Hidup, Serta Pengelolaan Pelayanan Publik Berbasis Teknologi (*Smart City*)



4. Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

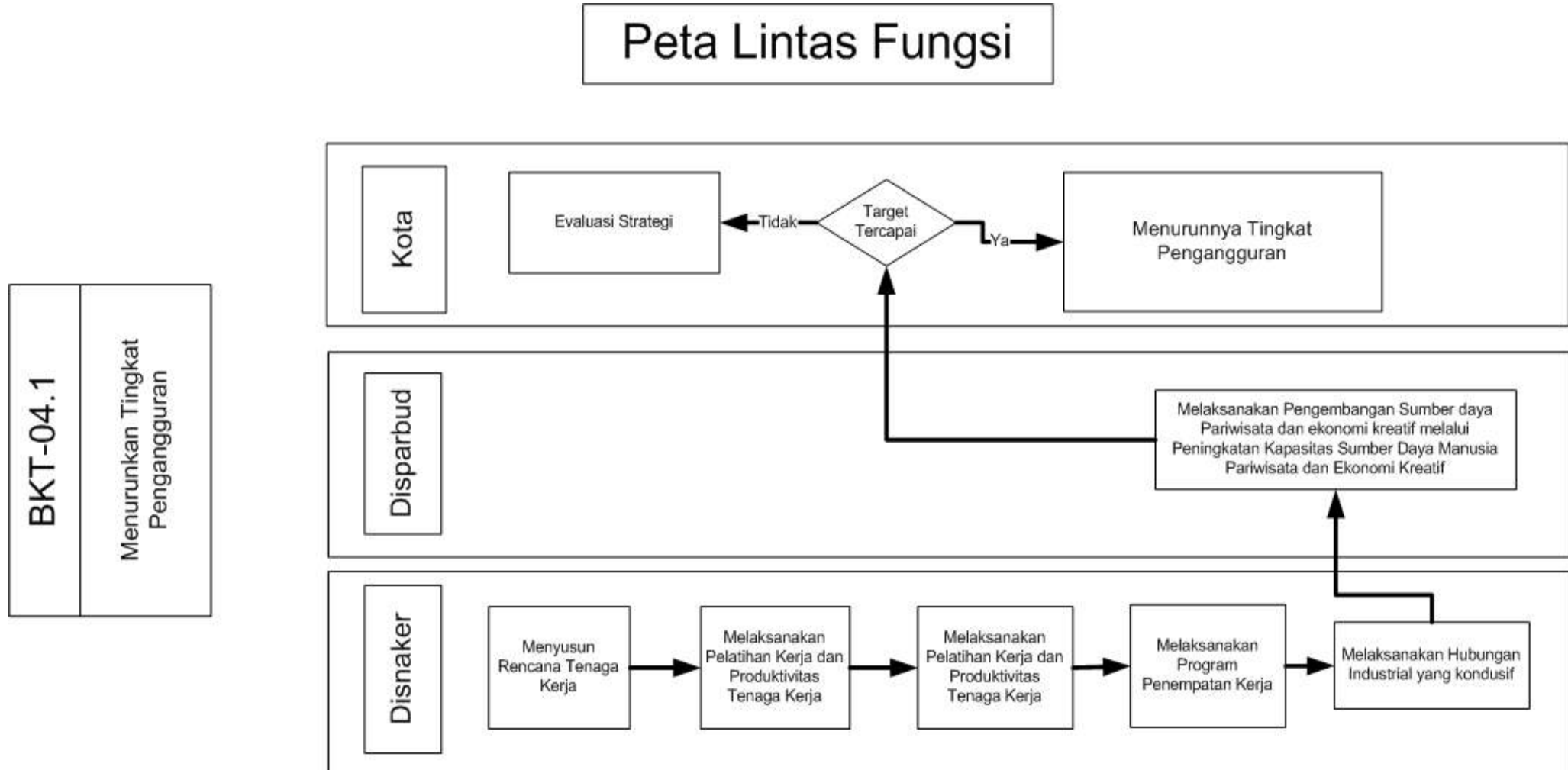


Peta Relasi BKT-04 Mewujudkan Pemerataan Kesejahteraan Masyarakat

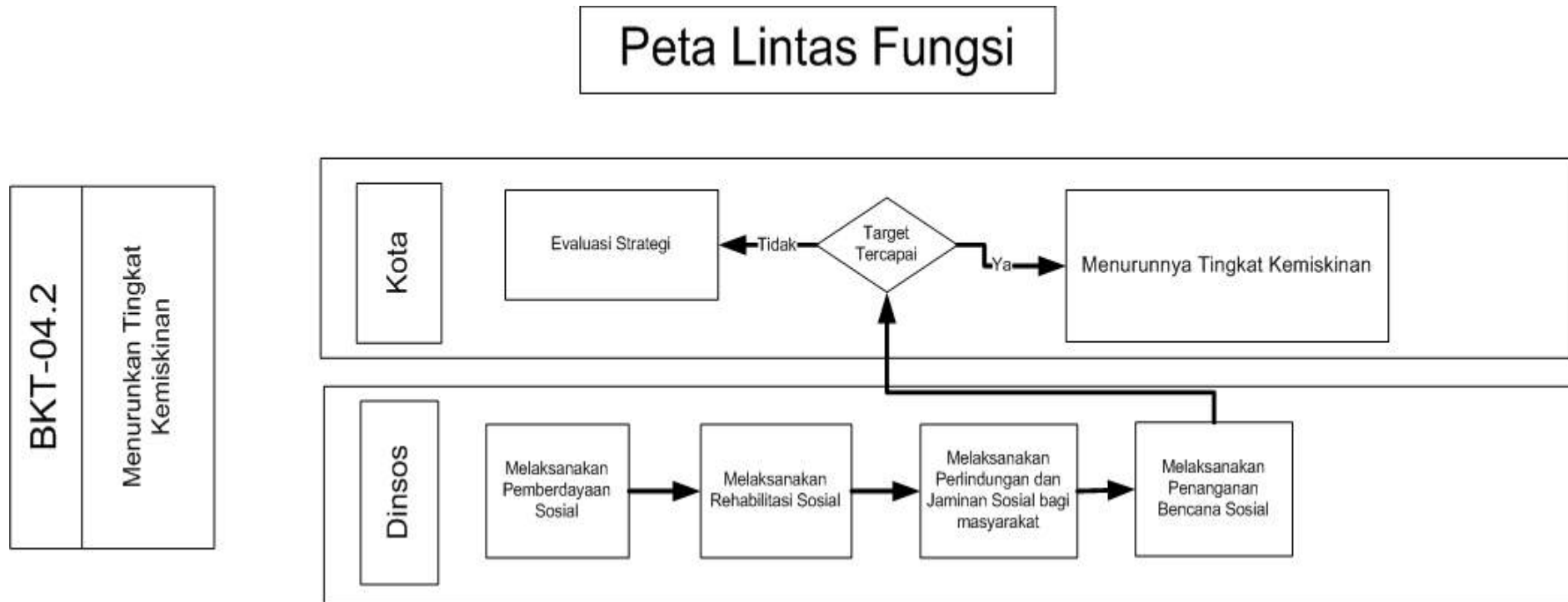


Peta Lintas Fungsi

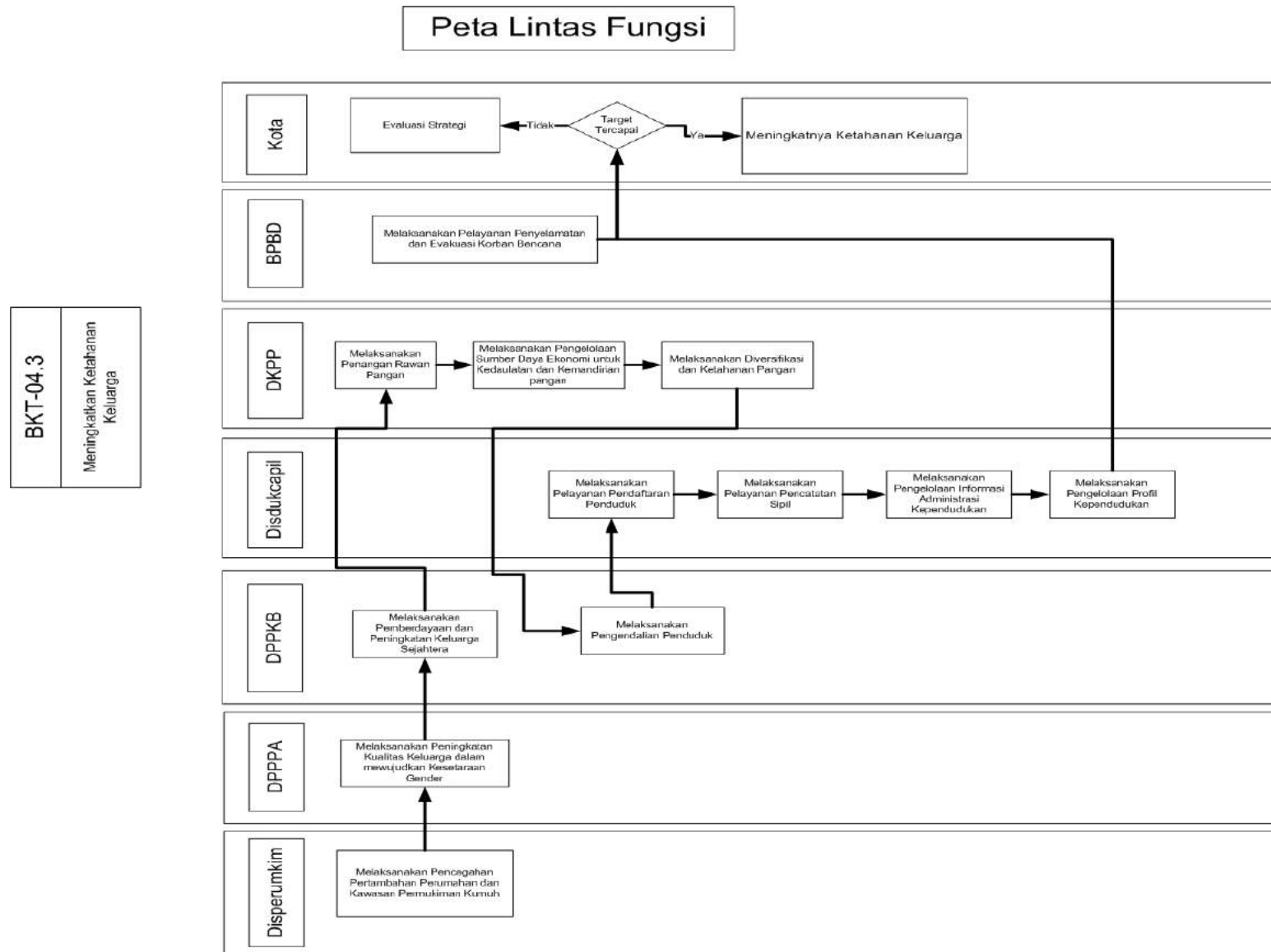
a. Menurunkan Tingkat Pengangguran



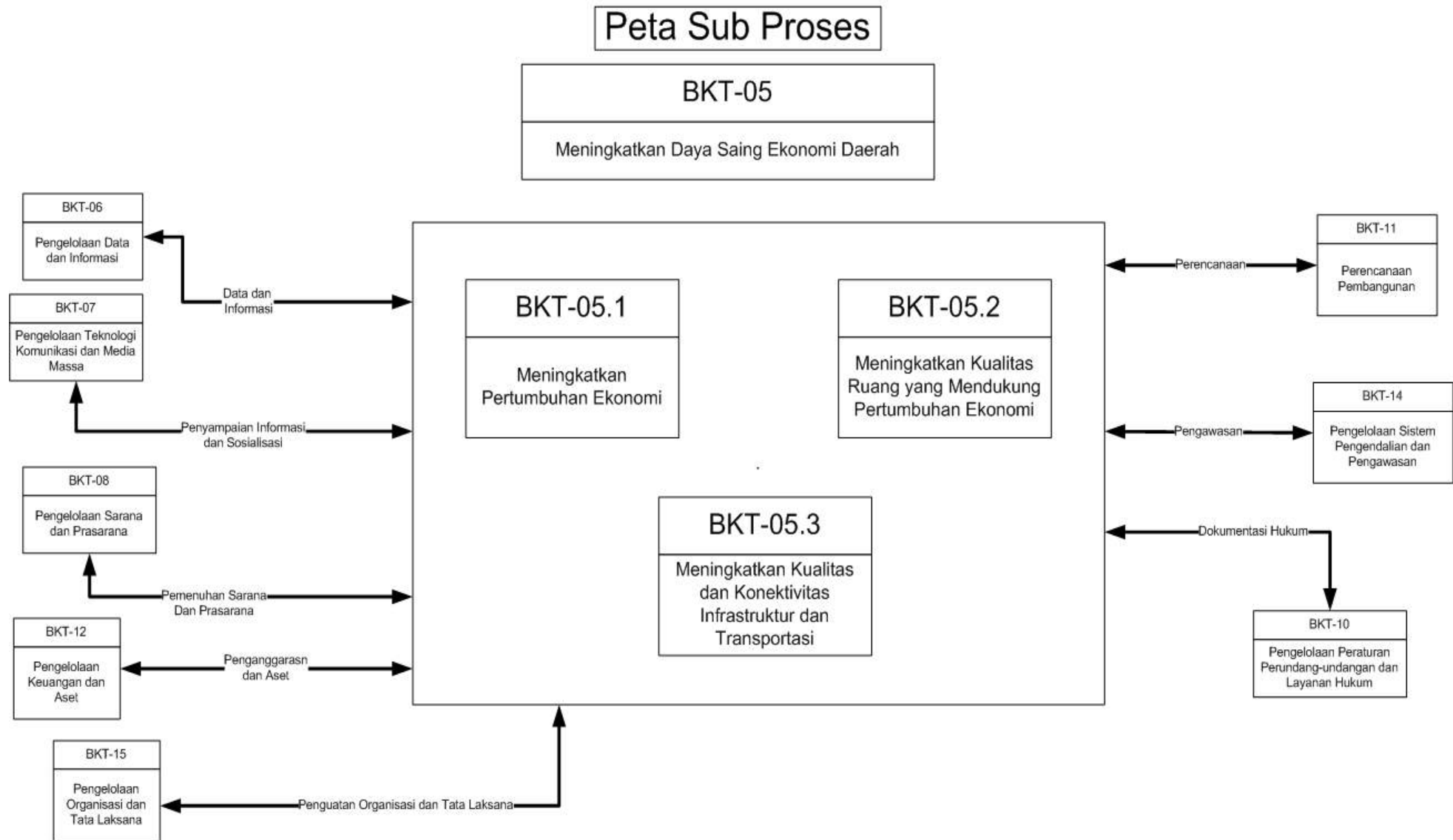
b. Menurunkan Tingkat Kemiskinan



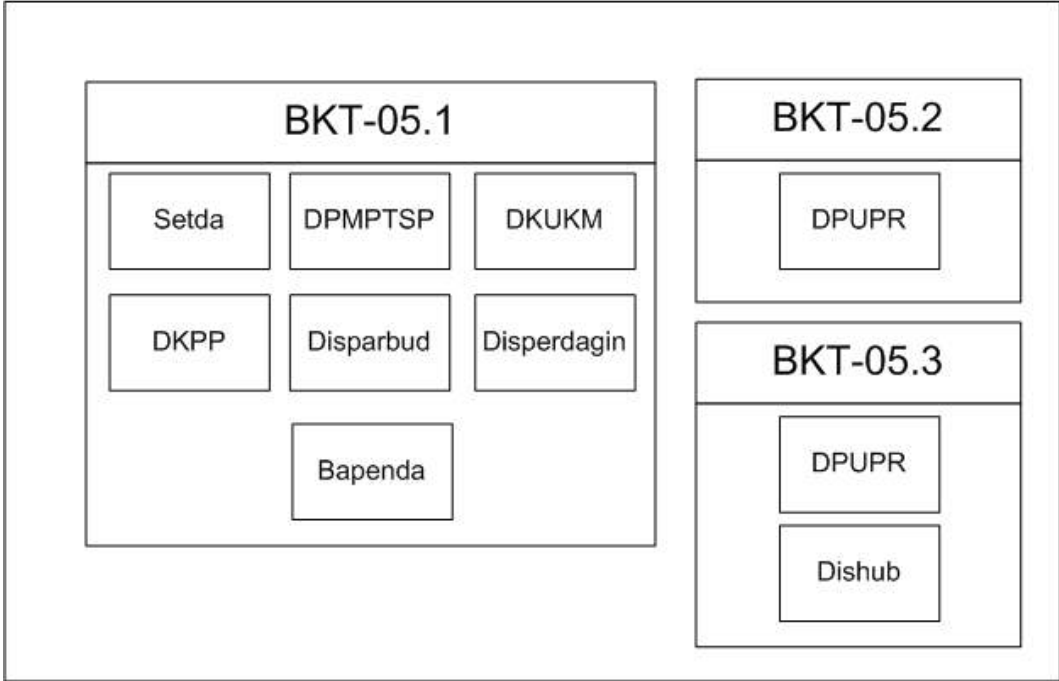
c. Meningkatkan Ketahanan Keluarga



5. Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah

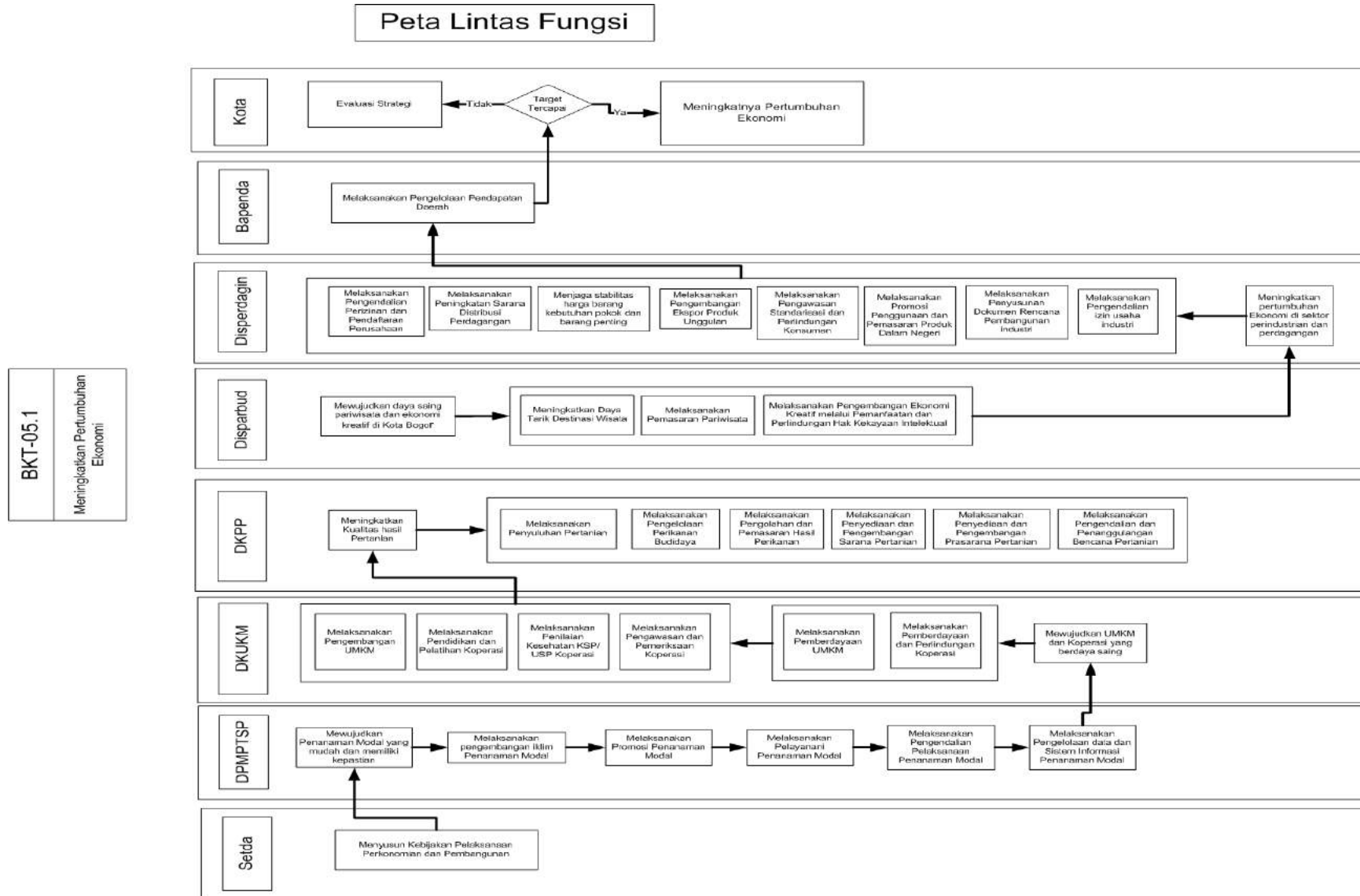


Peta Relasi BKT-05 Meningkatkan Daya Saing Ekonomi Daerah

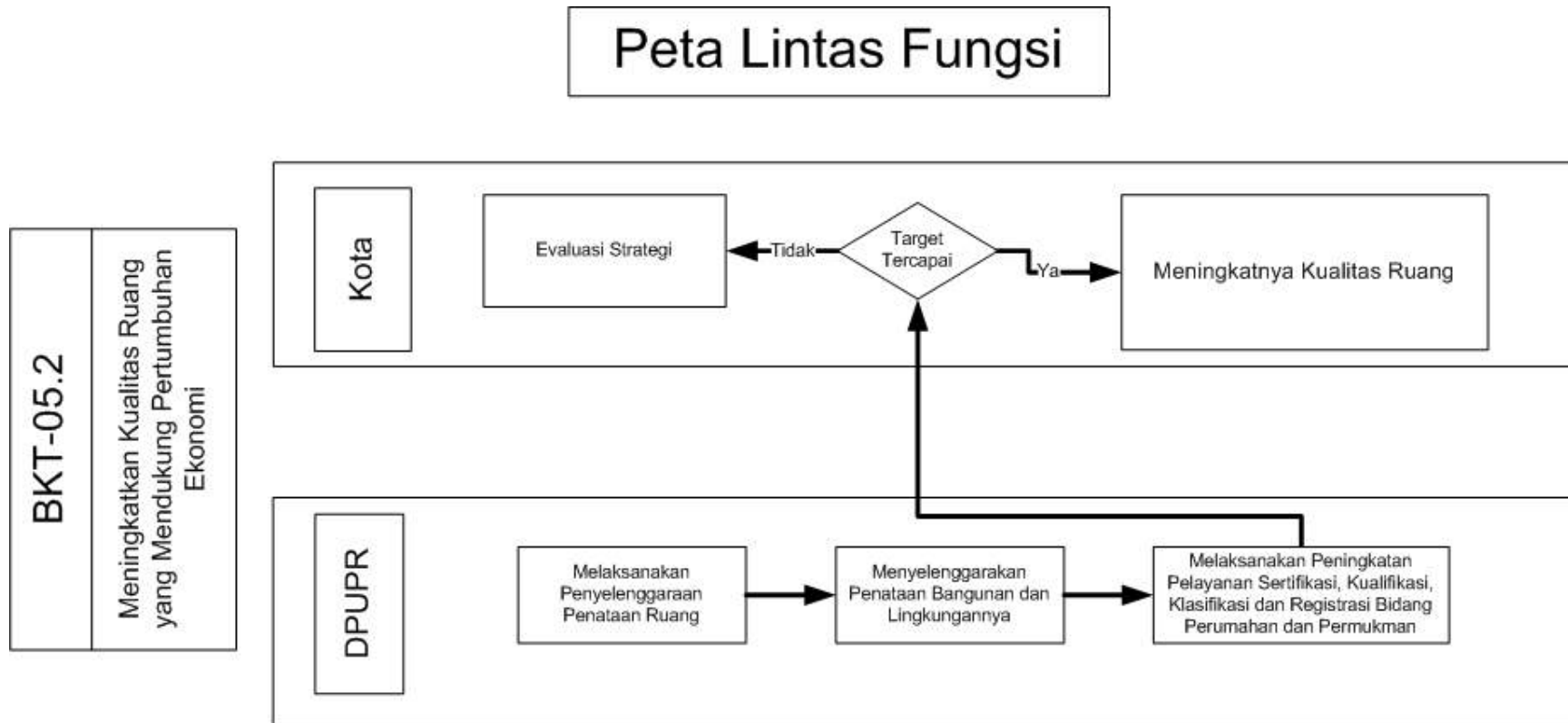


Peta Lintas Fungsi

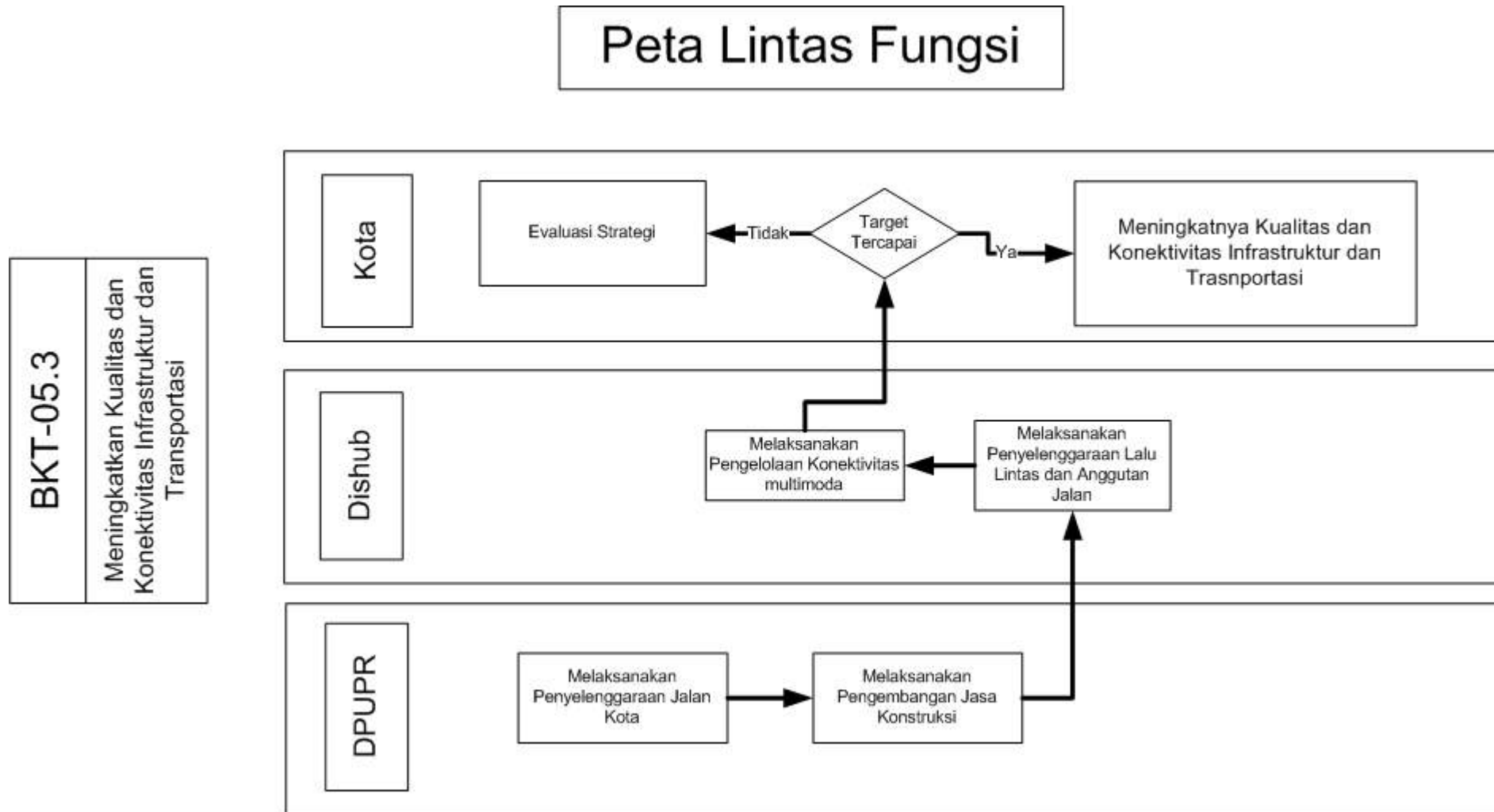
a. Meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi



b. Meningkatkan Kualitas Ruang yang mendukung Pertumbuhan Ekonomi

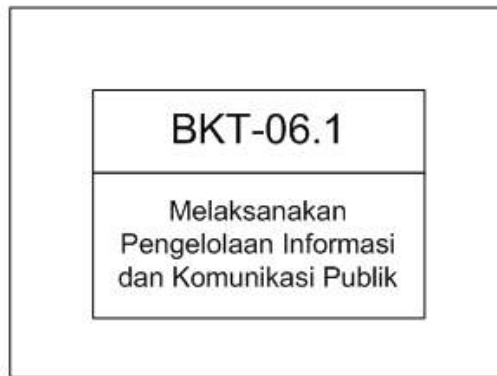


c. Meningkatnya Kualitas dan Konektivitas Infrastruktur dan Transportasi



6. Pengelolaan Data dan informasi

Peta Sub Proses

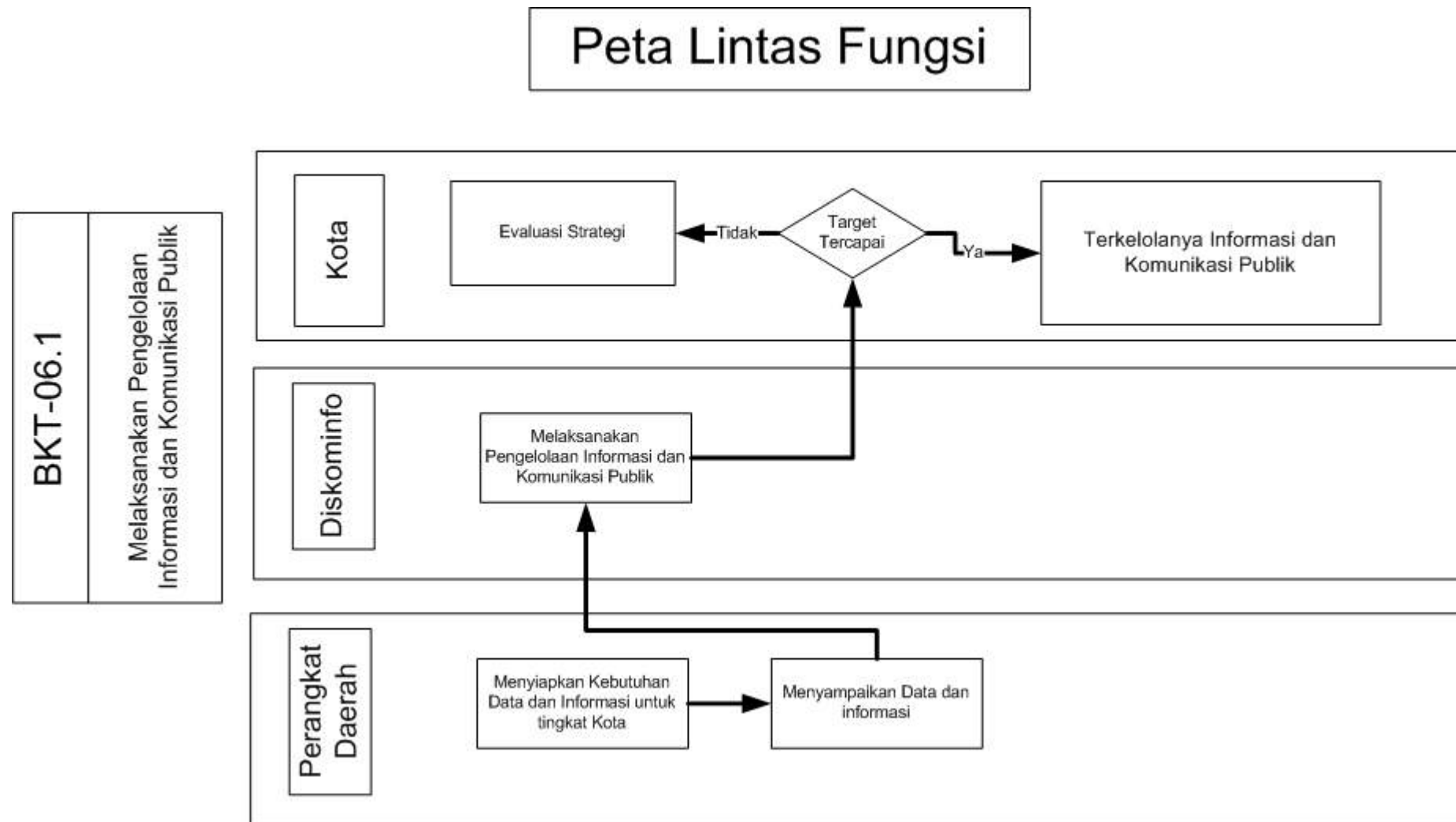


Peta Relasi BKT-06 Pengelolaan Data dan Informasi

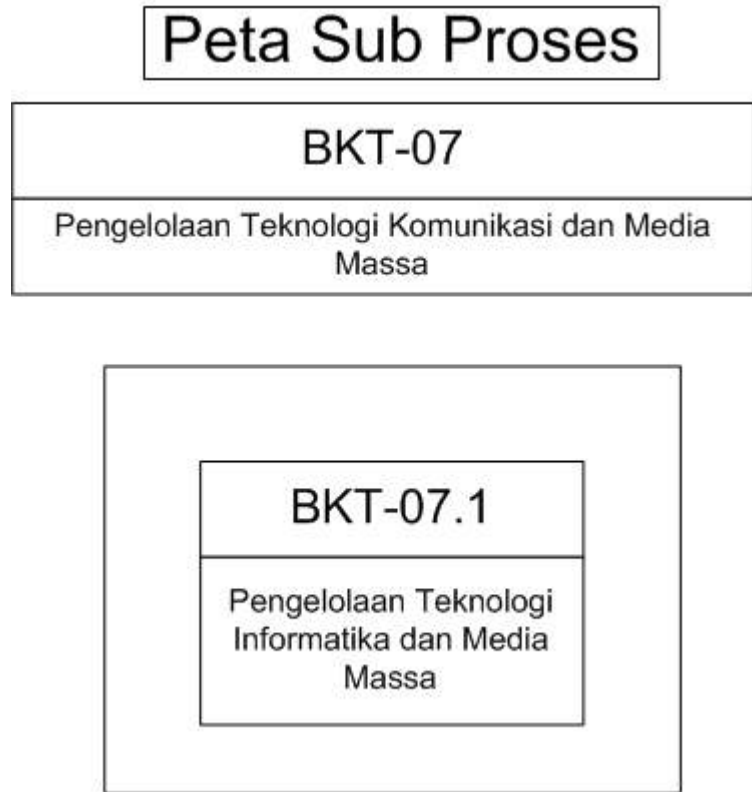
Peta Realasi



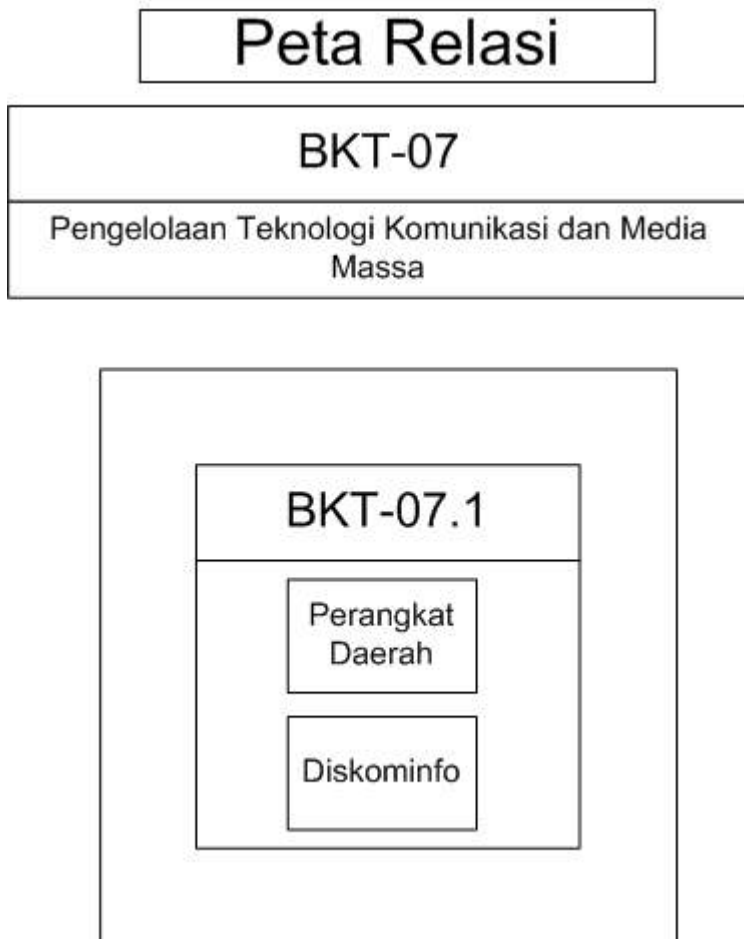
Lintas Fungsi Melaksanakan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik



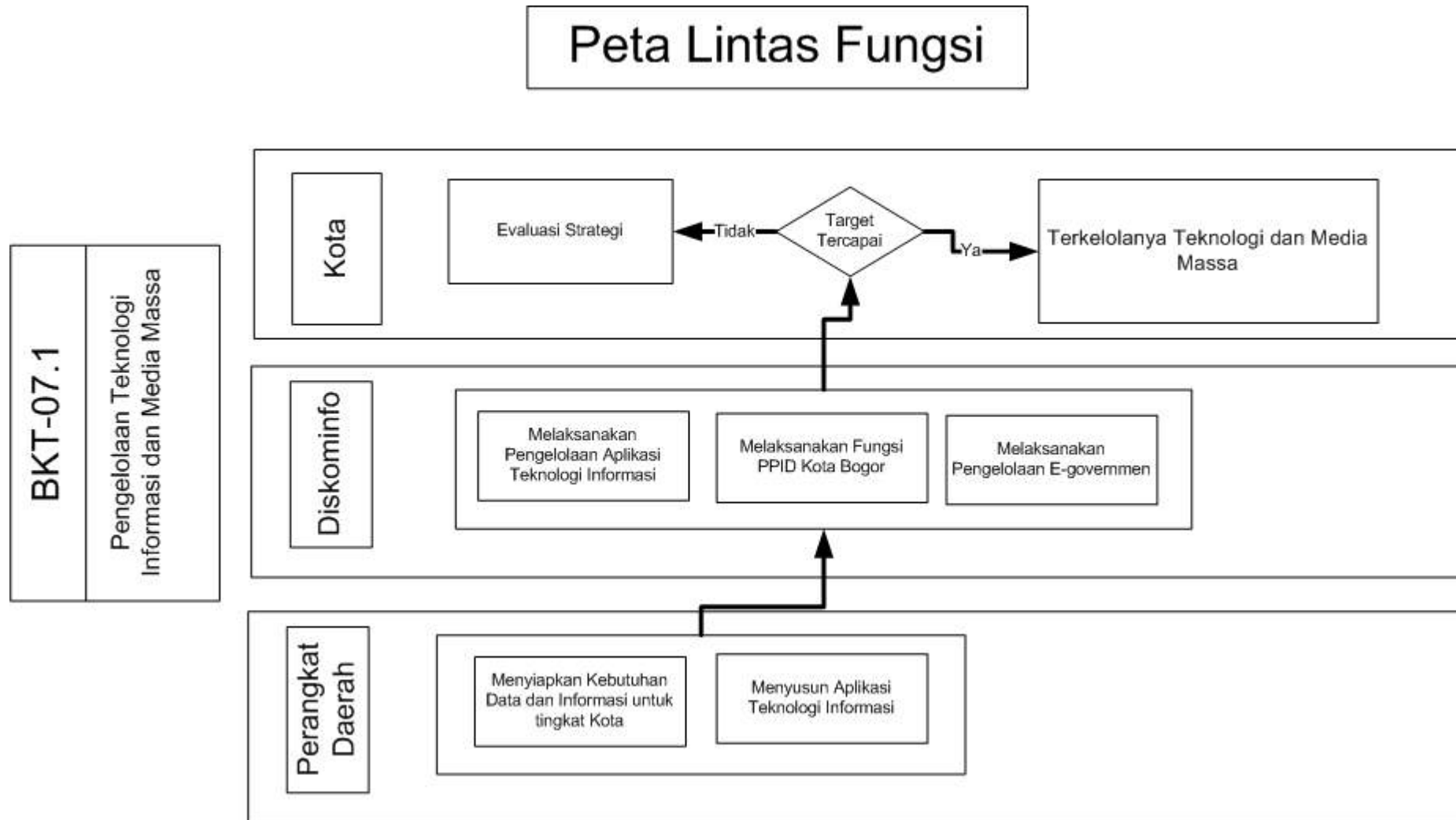
7. Pengelolaan Teknologi Komunikasi dan Media Massa



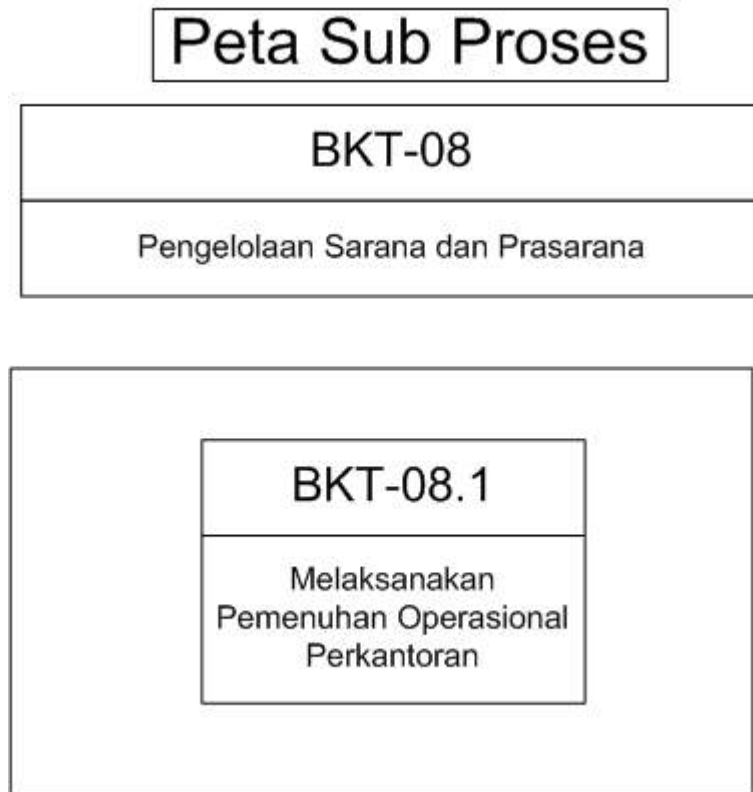
Peta Relasi BKT-07 Pengelolaan Teknologi Informasi dan Media Massa



Lintas Fungsi Pengelolaan Teknologi Informasi dan Media Massa



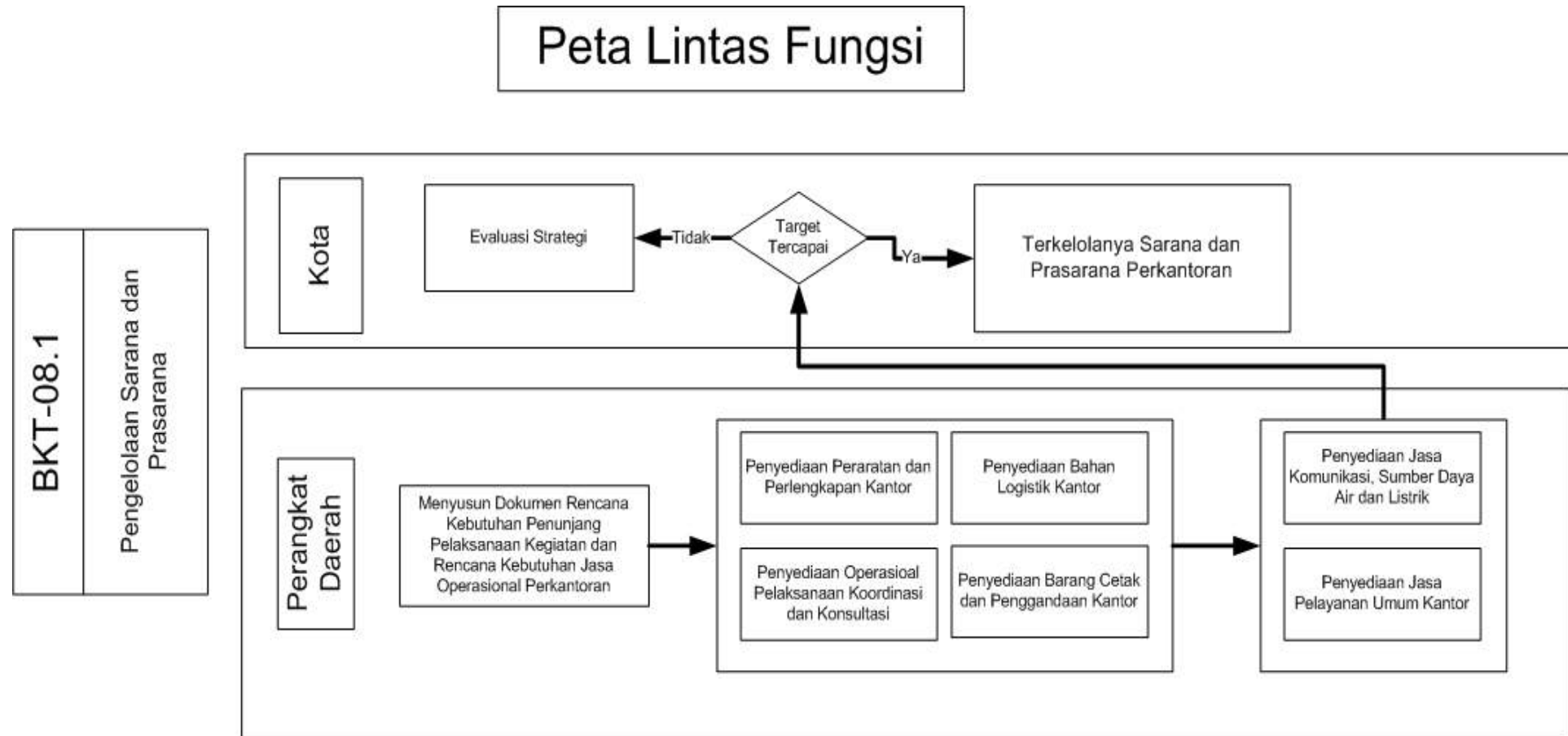
8. Pengelolaan Sarana dan Prasarana



Peta Relasi BKT-08 Pengelolaan Sarana dan Prasarana

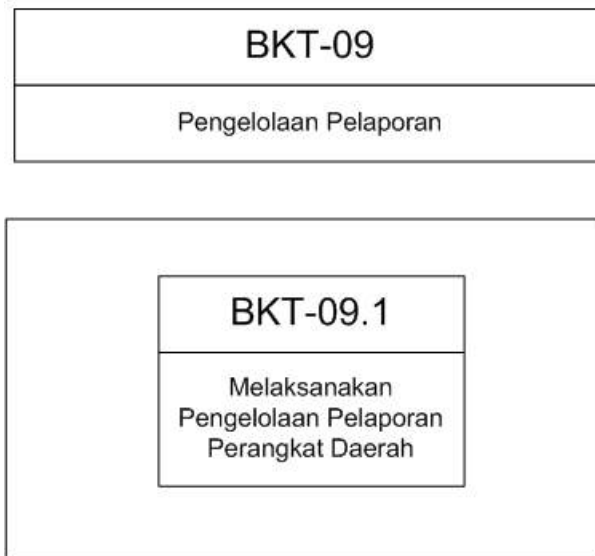


Lintas Fungsi Melaksanakan Pemenuhan Operasional Perkantoran



9. Pengelolaan Pelaporan

Peta Sub Proses

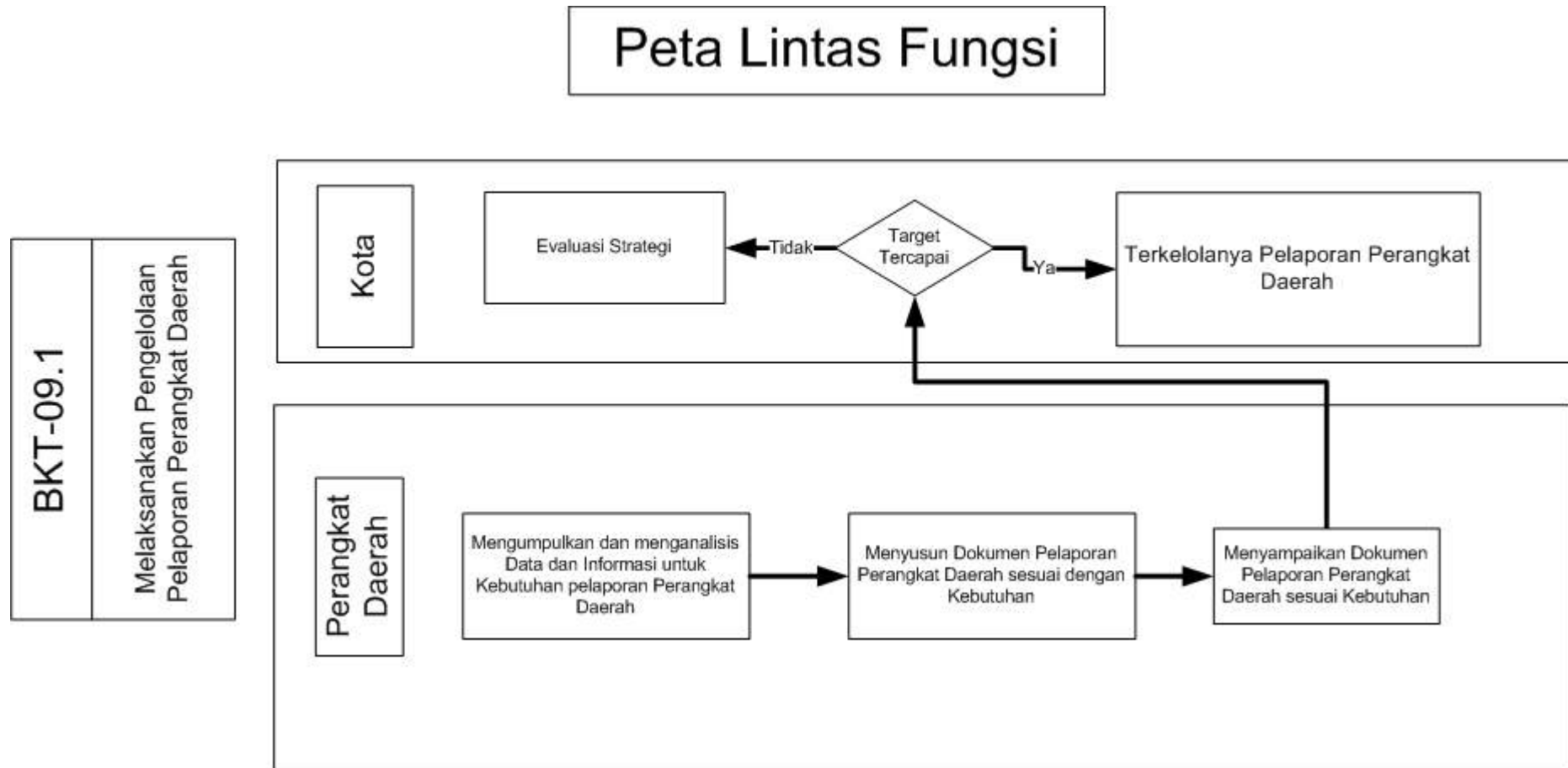


Relasi BKT-09 Pengelolaan Pelaporan

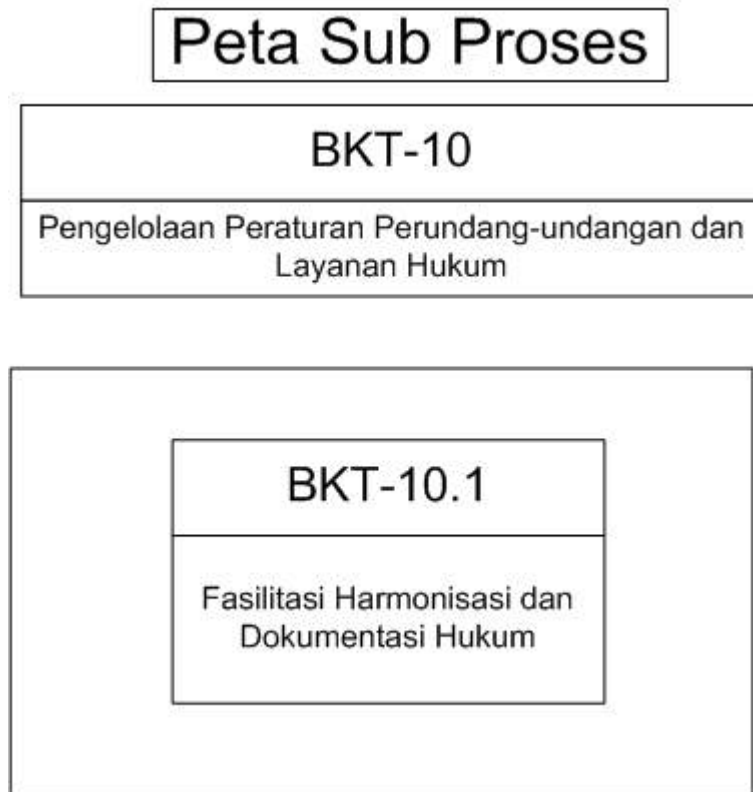
Peta Relasi



Lintas Fungsi Melaksanakan Pengelolaan Pelaporan Perangkat Daerah



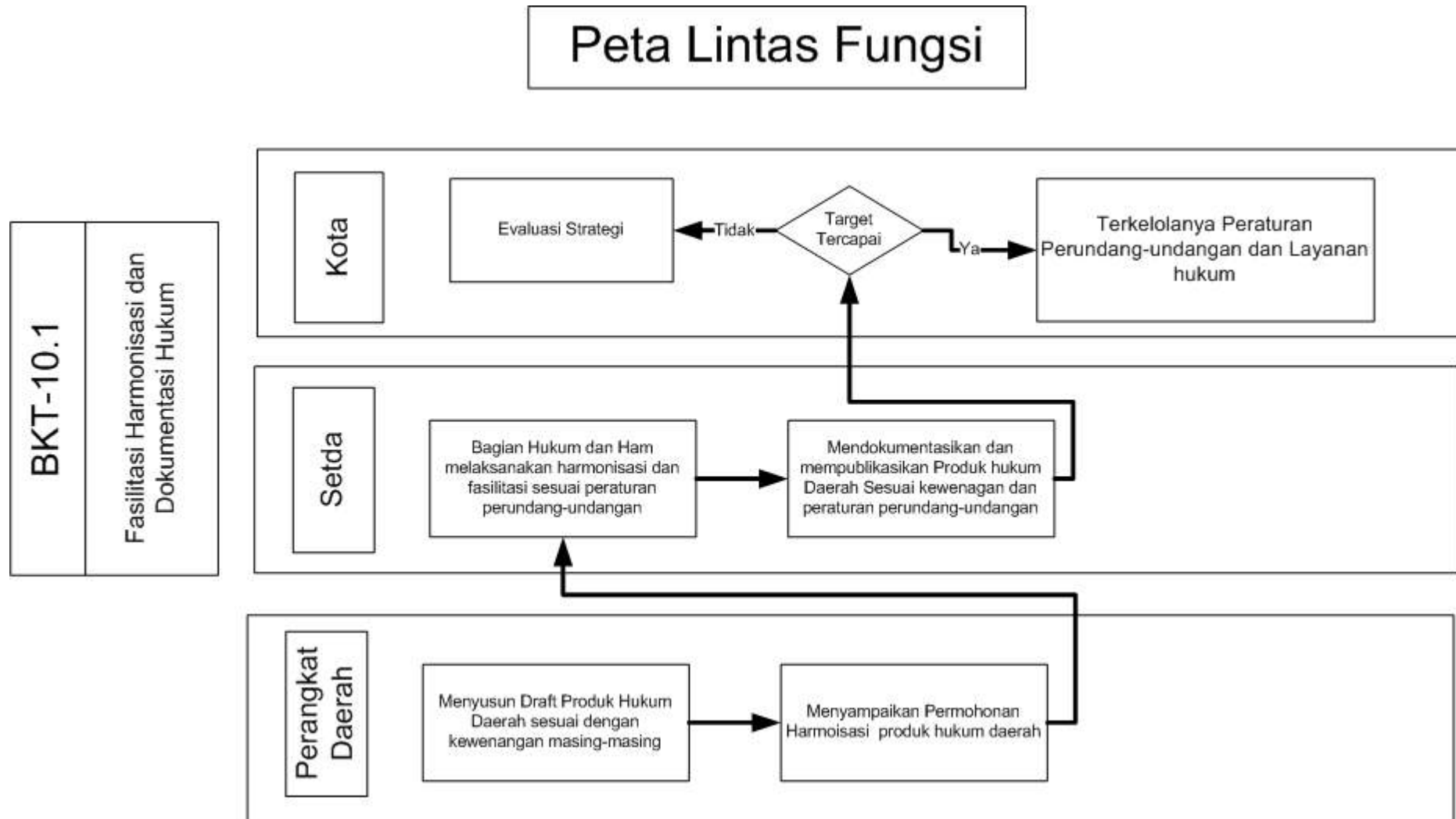
10. Pengelolaan Peraturan Perundang-undangan dan Layanan Hukum



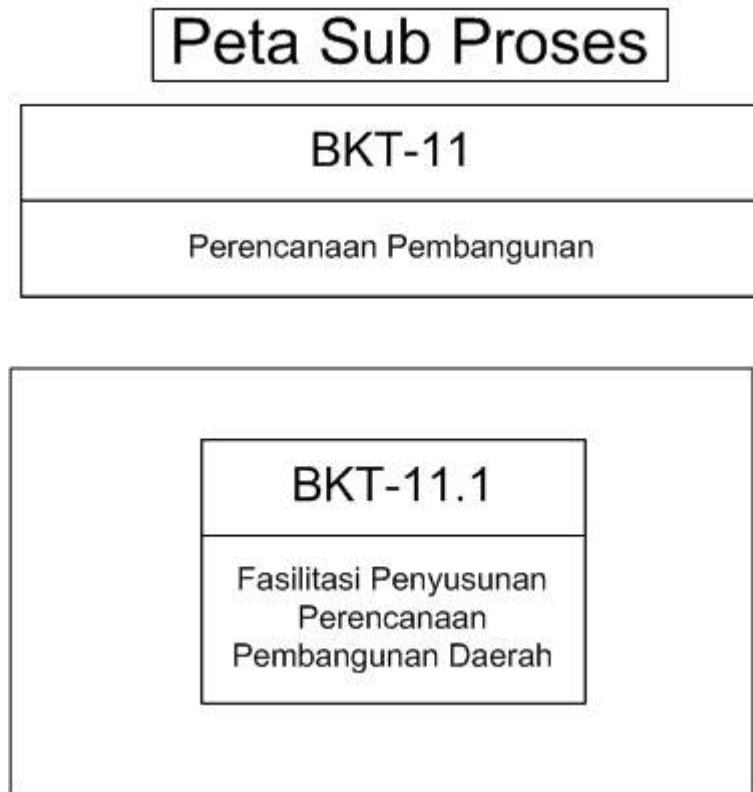
Peta Relasi BKT-10 Pengelolaan Peraturan Perundang-Undangan dan Layanan Hukum



Lintas Fungsi Fasilitasi Harmonisasi dan Dokumentasi Hukum



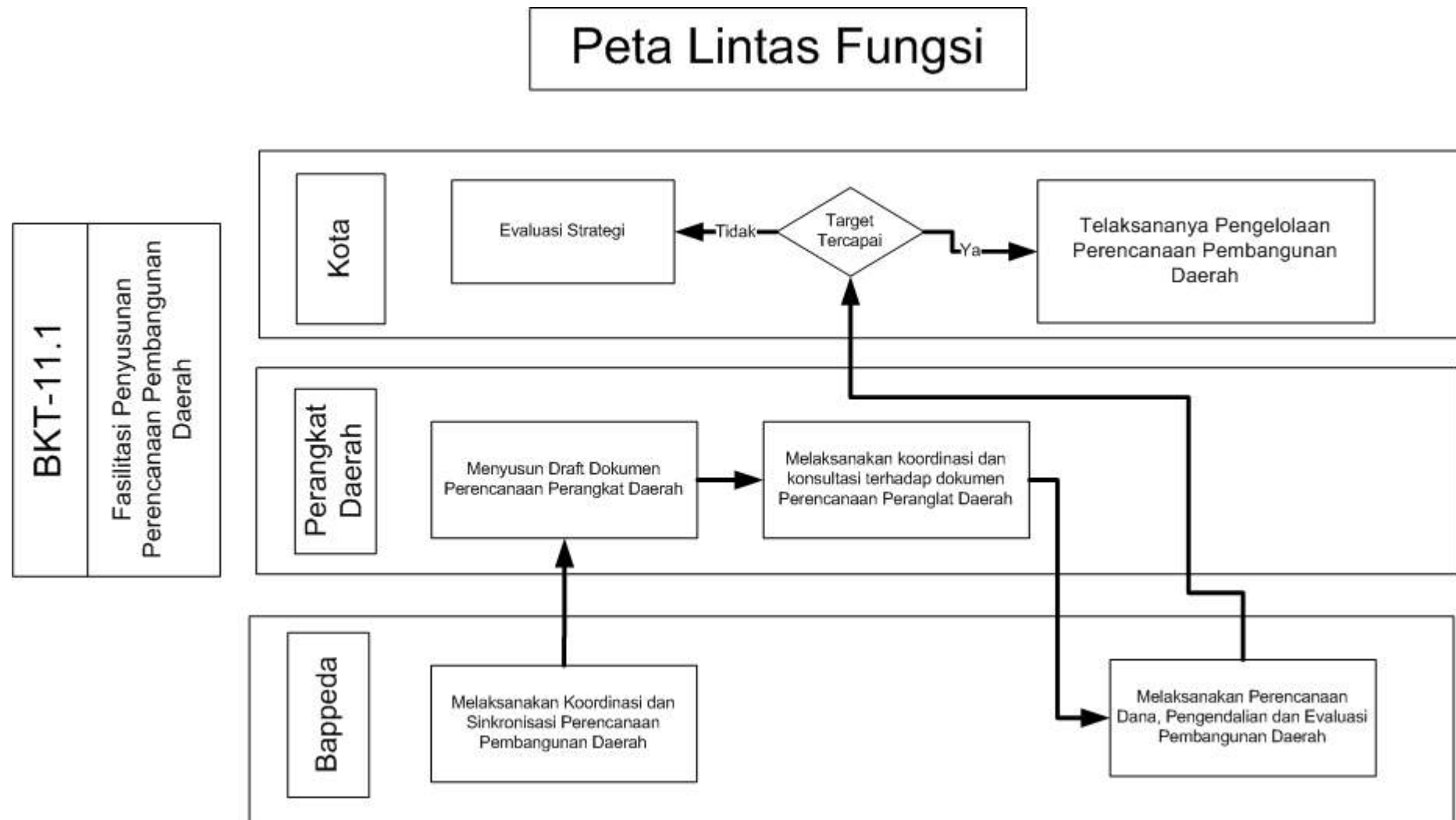
11. Perencanaan Pembangunan



Peta Relasi BKT-11 Perencanaan Pembangunan



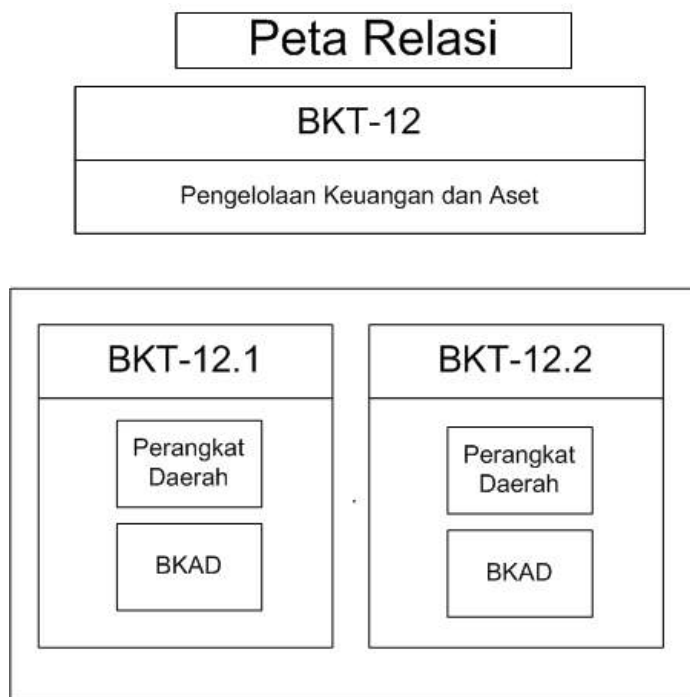
Lintas Fungsi Fasilitasi Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah



12. Pengelolaan keuangan dan Aset

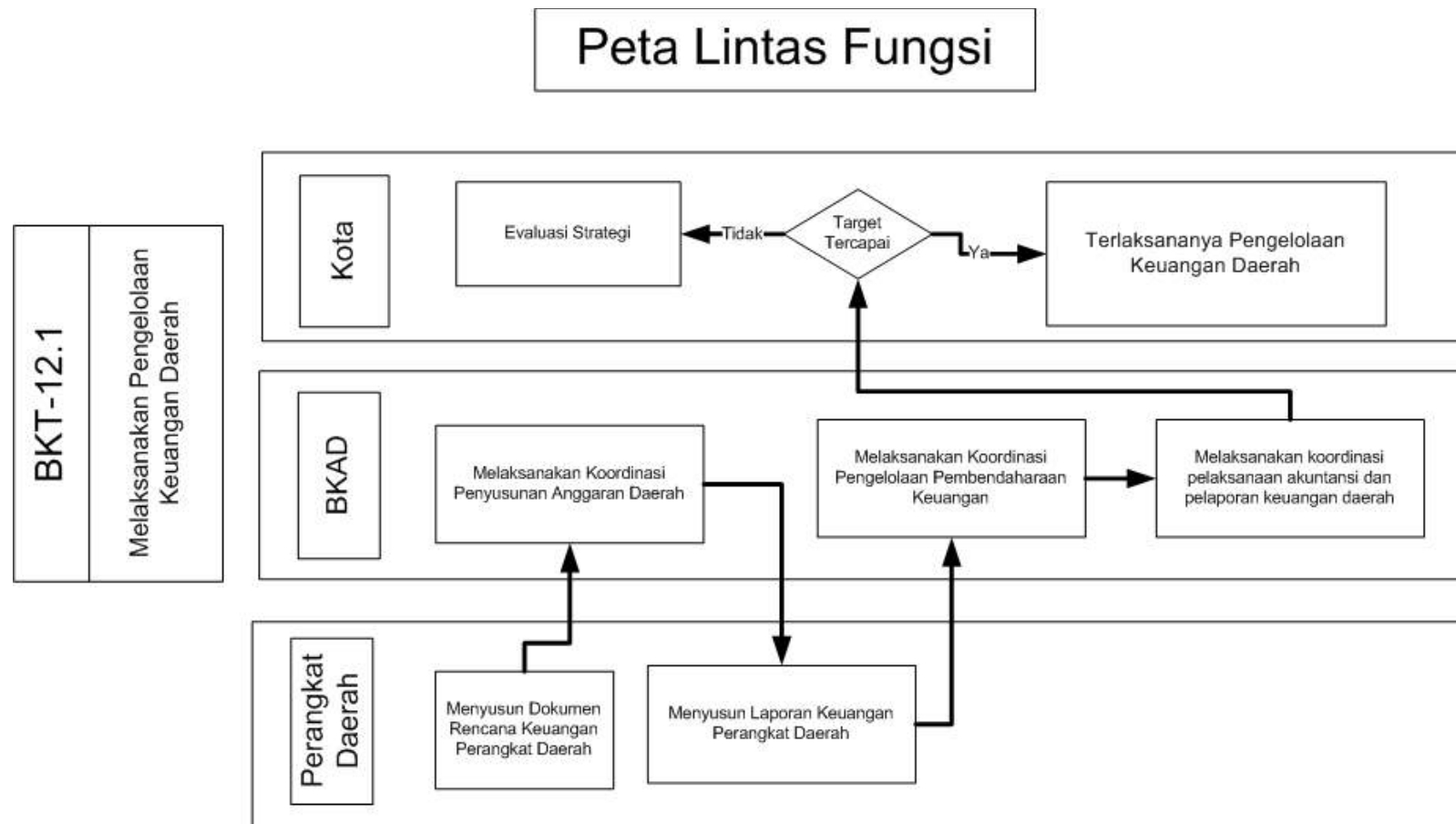


Peta Relasi BKT-12 Pengelolaan Keuangan dan Aset

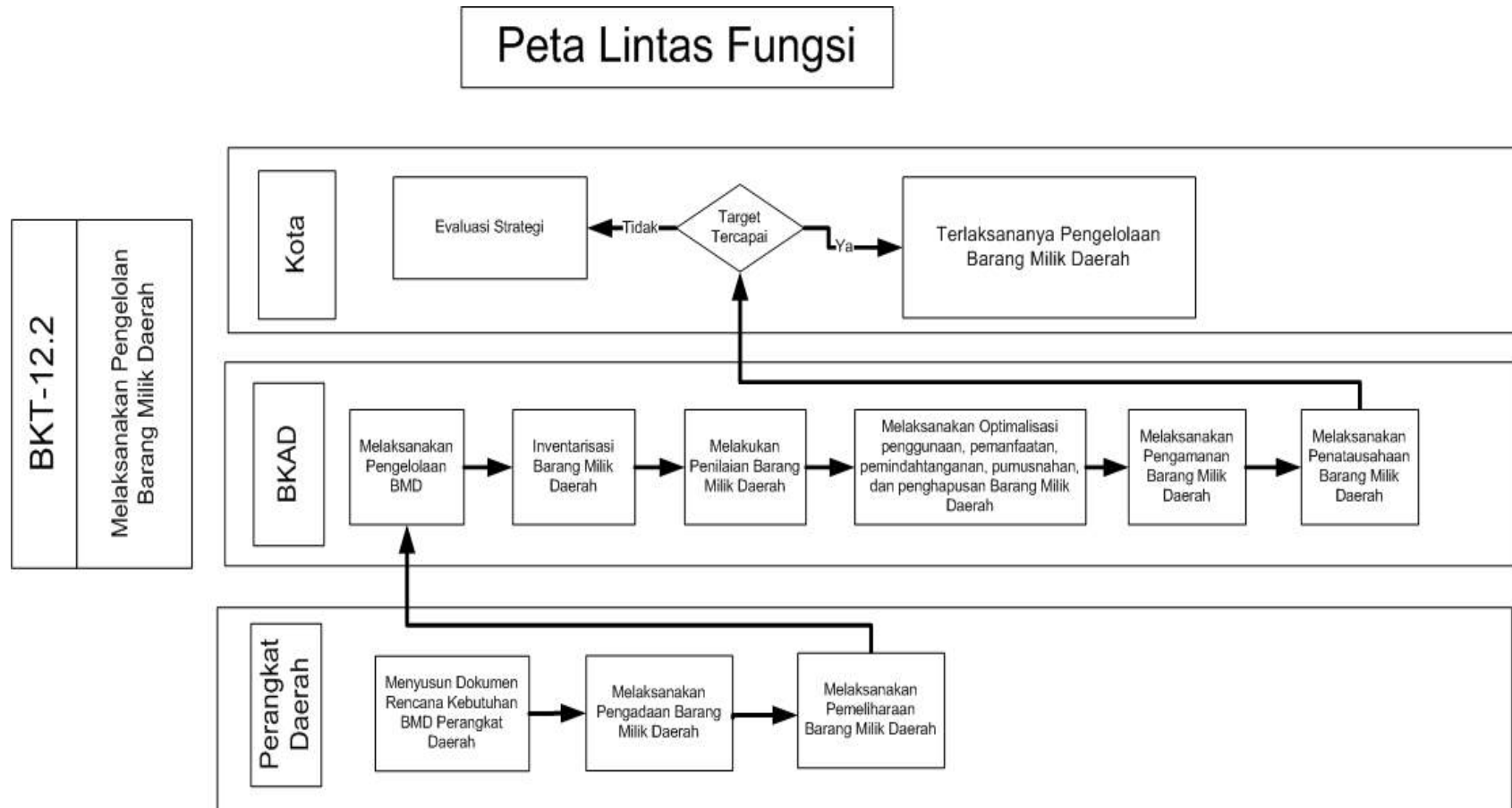


Lintas Fungsi

a. Melaksanakan Pengelolaan Keuangan Daerah



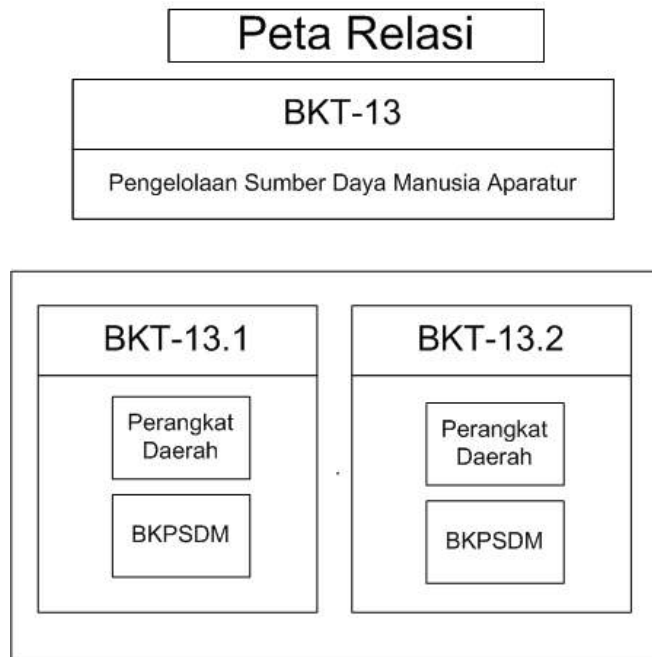
b. Melaksanakan Pengelolaan Barang milik Daerah



13. Pengelolaan Sumber Daya Aparatur

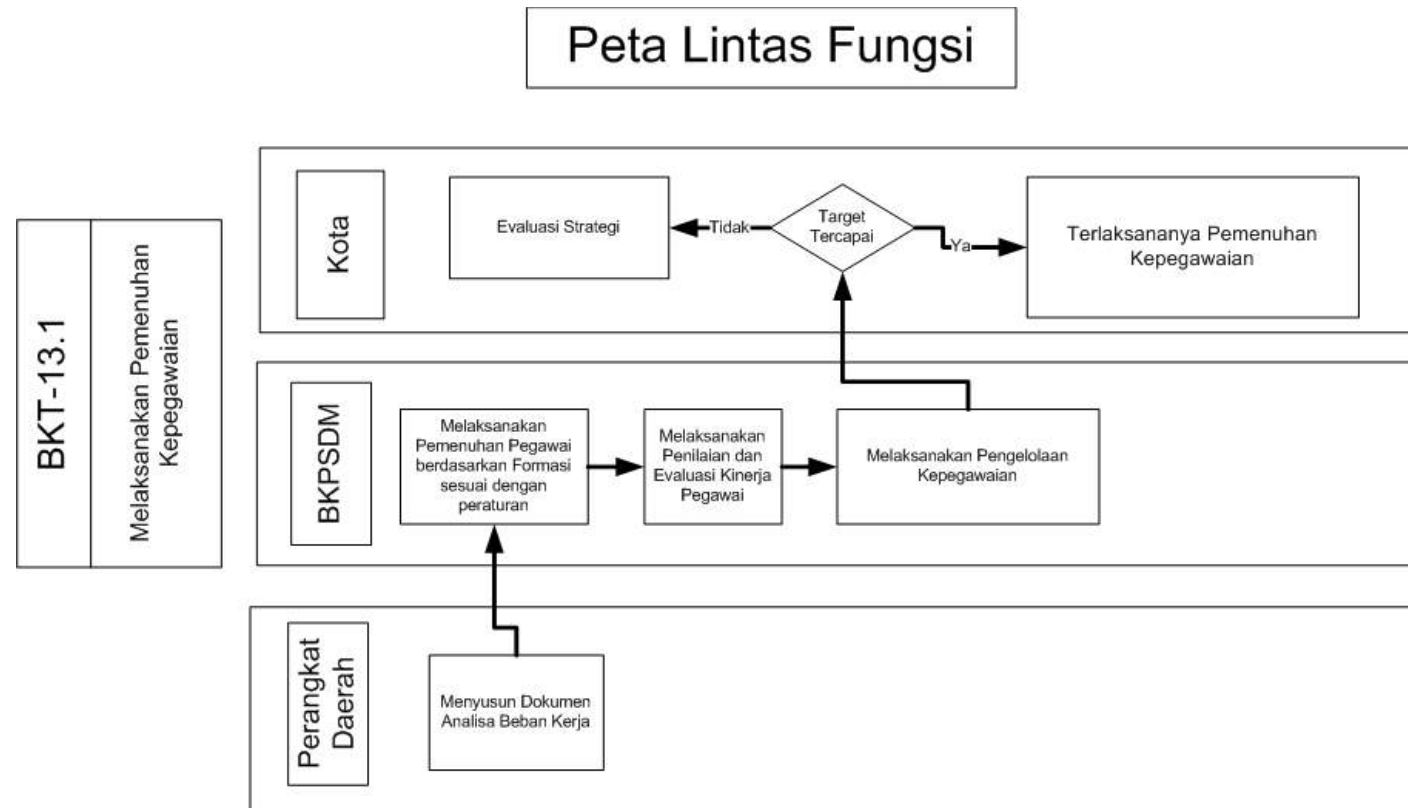


Peta relasi BKT-13 Pengelolaan Sumber Daya Manusia Aparatur

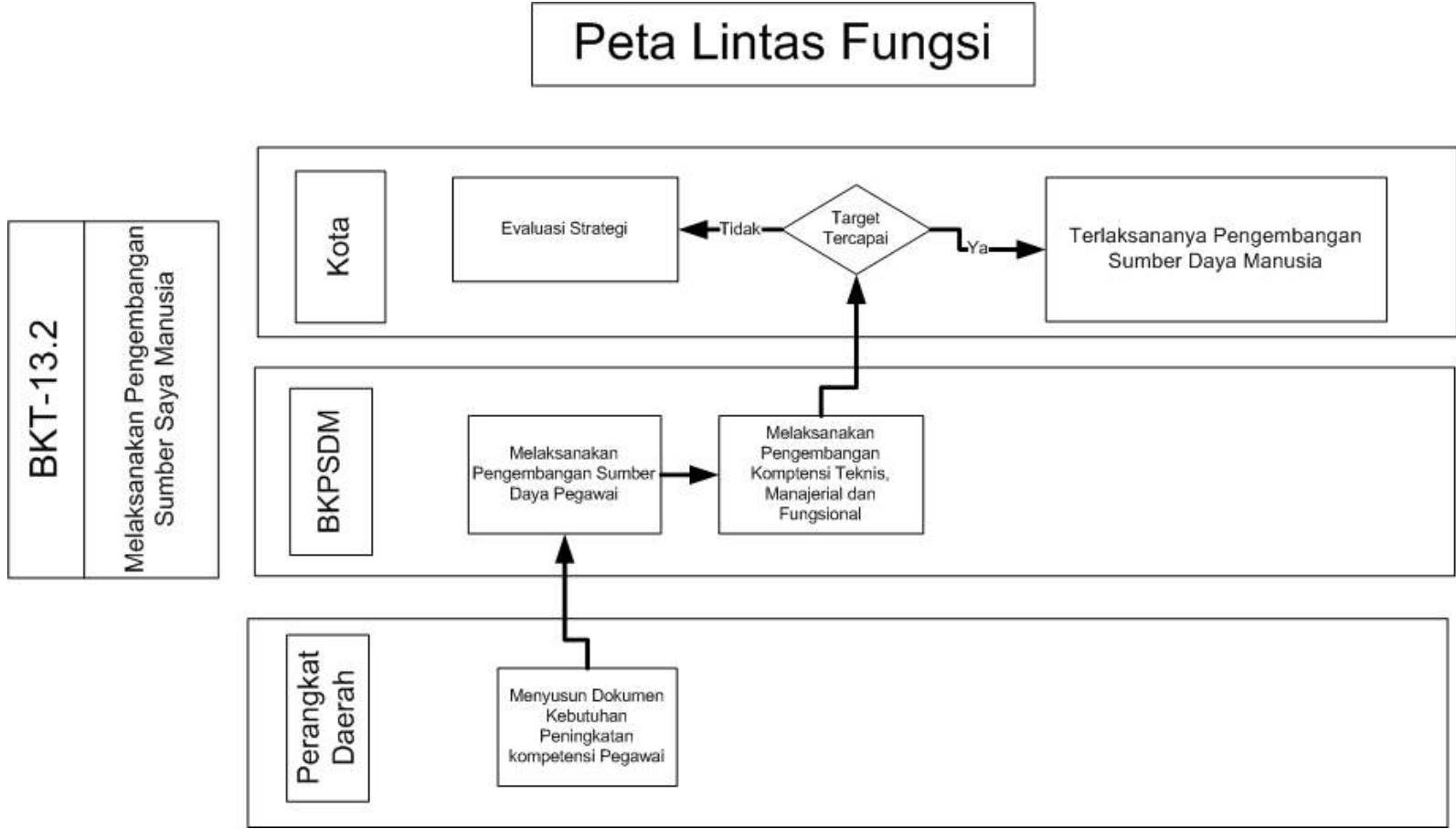


Lintas Fungsi

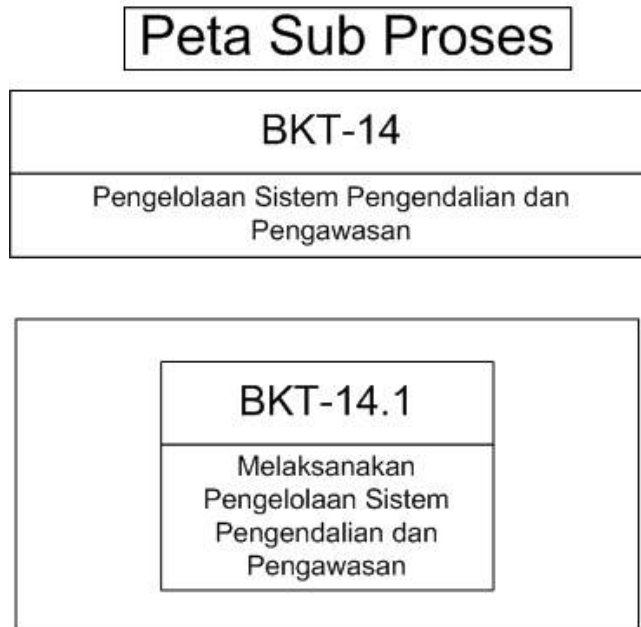
a. Melaksanakan Pemenuhan kepegawaian



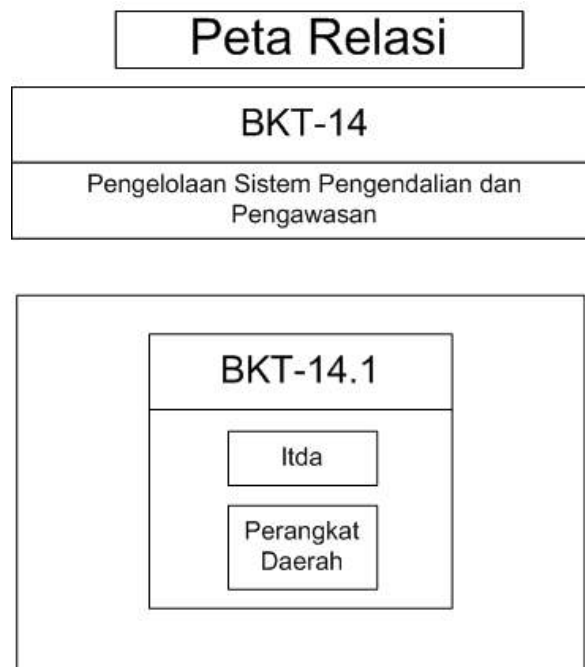
b. Melaksanakan Pengembangan Sumber Daya Manusia



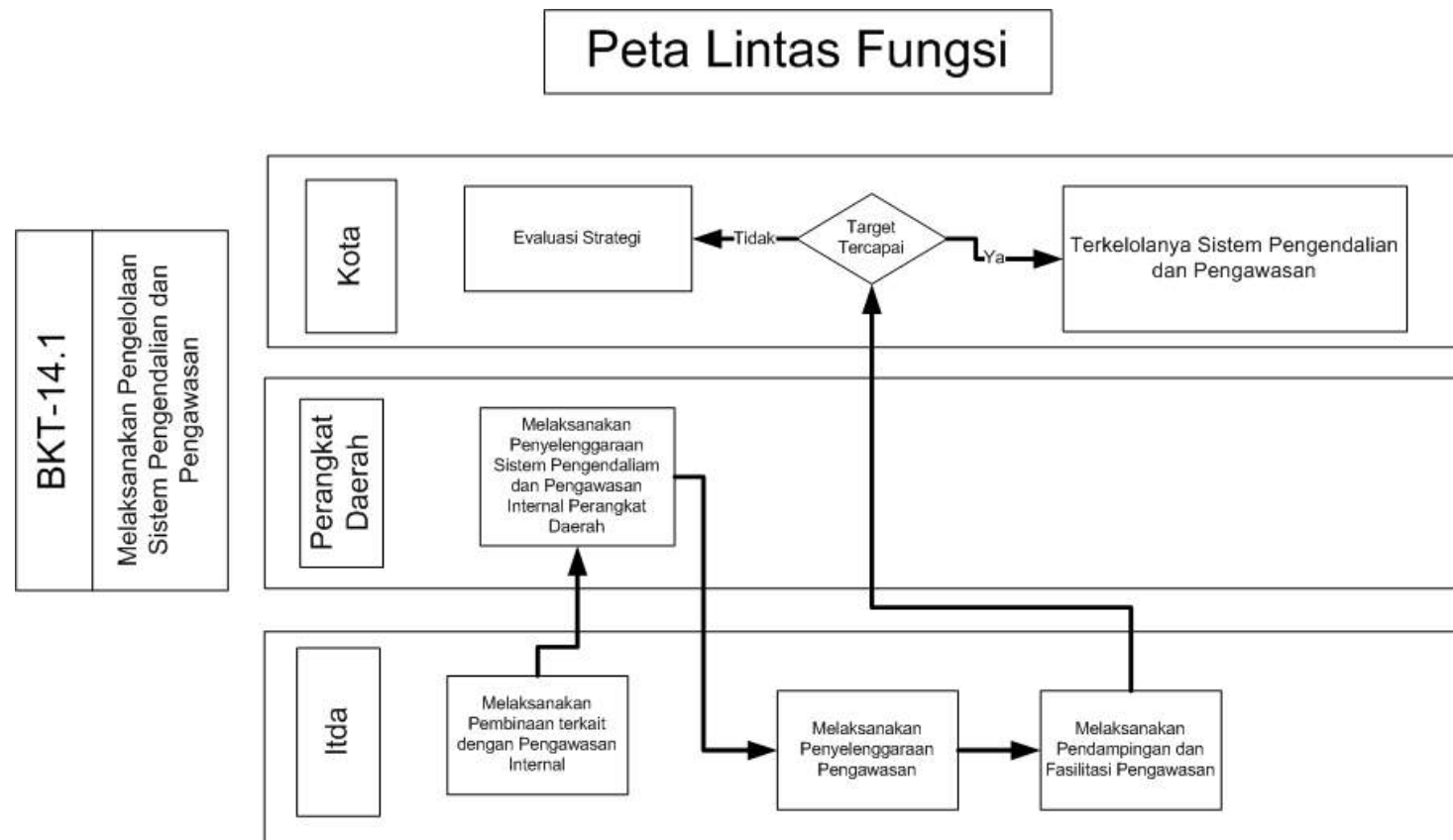
14. Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan



Peta Relasi BKT-14 Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan



Lintas Fungsi Melaksanakan Pengelolaan Sistem Pengendalian dan Pengawasan



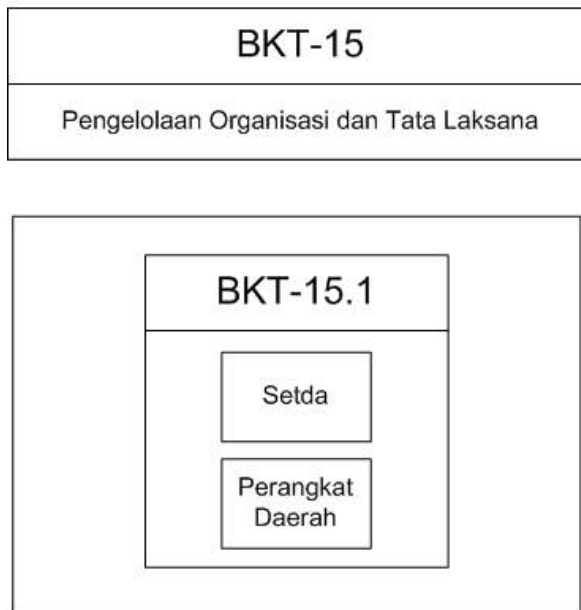
15. Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana

Peta Sub Proses

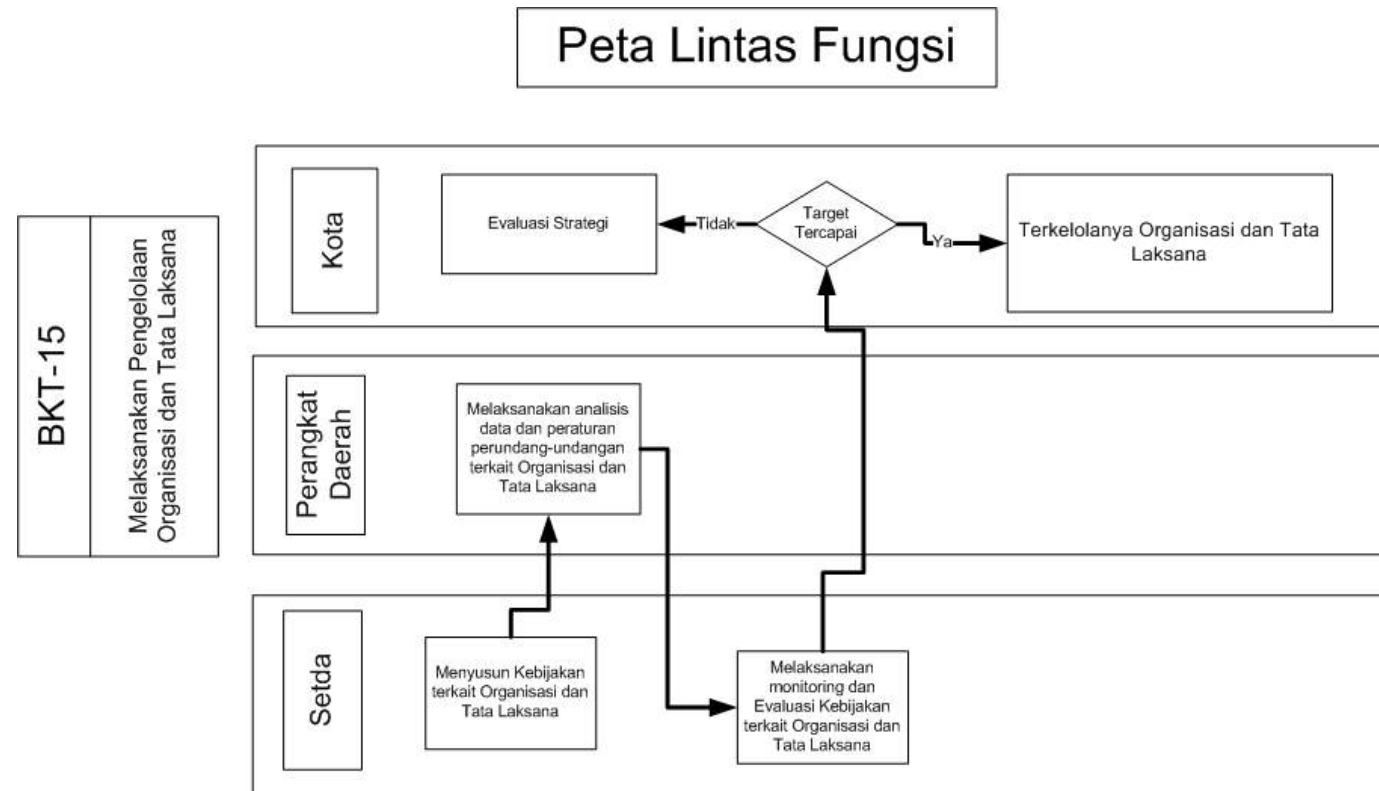


Peta Relasi BKT-15 Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana

Peta Relasi



Lintas Fungsi Melaksanakan Pengelolaan Organisasi dan Tata Laksana



16. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Peta Sub Proses

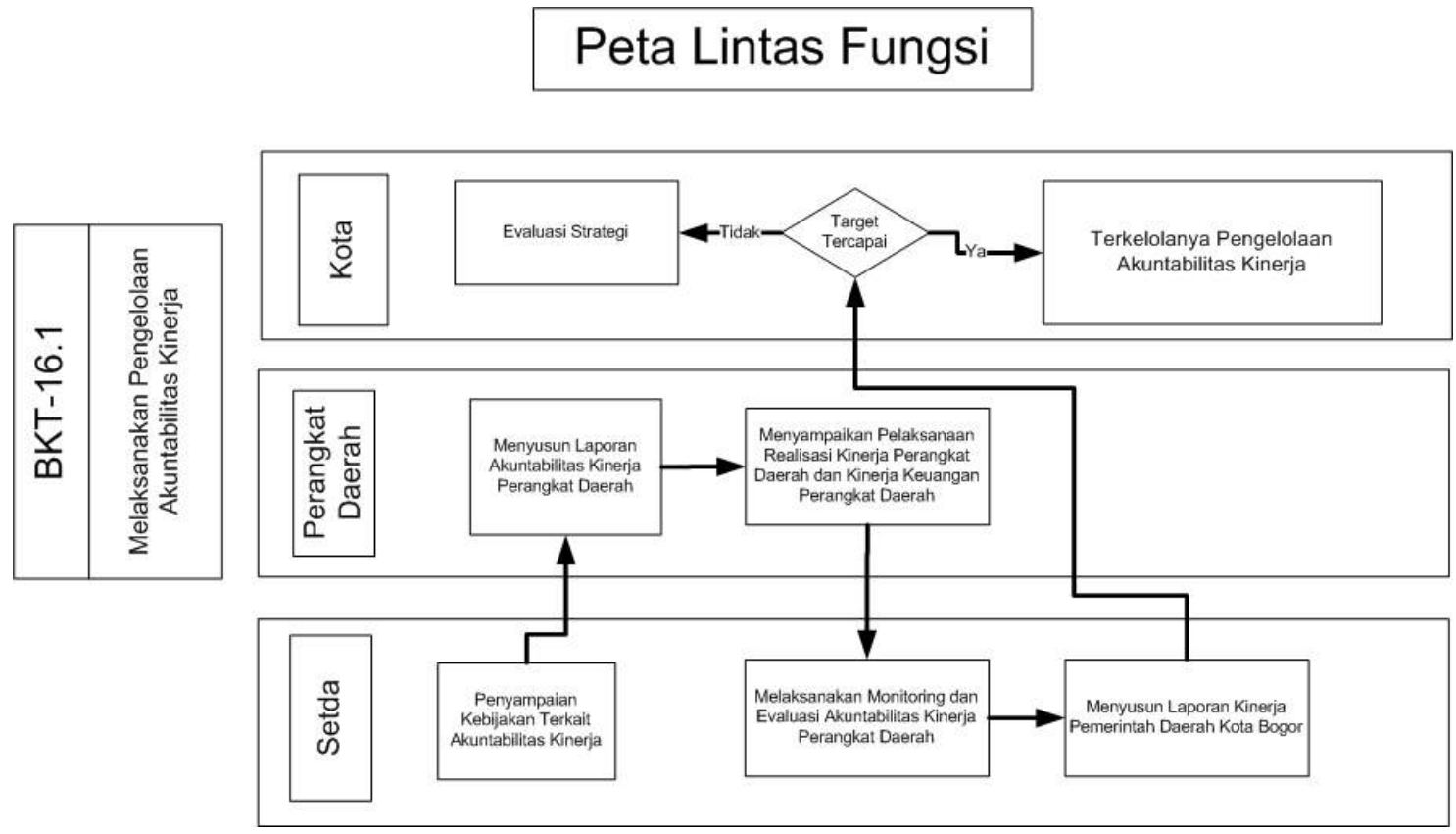


Peta Relasi BKT-16 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

Peta Relasi



Lintas Fungsi Melaksanakan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja




WALI KOTA BOGOR,
Bima Arya
BIMA ARYA